

PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH
(RENJA PD)

DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN TANGGAMUS
TAHUN 2024



PEMERINTAH KABUPATEN TANGGAMUS
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KOTAAGUNG
TAHUN 2024



PEMERINTAH KABUPATEN TANGGAMUS
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
Jalan Gatot Subroto No. 4 Telp. (0722) 21755, 21511 Fax. 21755
KOTA AGUNG

KEPUTUSAN KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN TANGGAMUS
NOMOR : 050/ 1769 / 26 / 2024

TENTANG
PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH
TAHUN 2024

KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN TANGGAMUS,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 343 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan berkenaan dengan perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2024 dan pergeseran kegiatan didalam Perangkat Daerah perlu melakukan Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2024 dan menetapkannya dengan Keputusan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil ;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1997 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Tulang Bawang dan Kabupaten Daerah Tingkat II Tanggamus (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3667);

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025 (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pelaksanaan Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6881);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6883);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Harmonisasi Kebijakan Fiskal Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6909);
13. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);

14. Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 180);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Harmonisasi Kebijakan Fiskal Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6909);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
17. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor : 29/PRT/M/2018 tentang Standar Teknis Standar Pelayanan Minimal Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1891);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 101 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Sub Urusan Bencana Daerah Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1541);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Sub Urusan Kebakaran Daerah Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1619);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 121 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Mutu Pelayanan Dasar Sub Urusan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Di Provinsi dan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 158);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);
24. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 32 Tahun 2022 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 677);

25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 630);
26. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 13 Tahun 2023 tentang Standar Teknis Standar Pelayanan Minimal Bidang Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1006);
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 799);
28. Keputusan Menteri Dalam Negeri 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
29. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 6 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Lampung Tahun 2005–2025 (Lembaran Daerah Provinsi Lampung Tahun 2007 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Lampung Nomor 314);
30. Peraturan Gubernur Lampung Nomor 15 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Lampung Tahun 2024 (Berita Daerah Provinsi Lampung Tahun 2023 Nomor 15);
31. Peraturan Gubernur Lampung Nomor 55 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Lampung Tahun 2025-2026 (Berita Daerah Provinsi Lampung Tahun 2023 Nomor 55);
32. Peraturan Daerah Kabupaten Tanggamus Nomor 01 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten Tanggamus Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Tanggamus Tahun 2008 Nomor 27);
33. Peraturan Daerah Kabupaten Tanggamus Nomor 16 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Tanggamus Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Tanggamus Tahun 2011 Nomor 71, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tanggamus Nomor 18);
34. Peraturan Daerah Kabupaten Tanggamus Nomor 08 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tanggamus (Lembaran Daerah Kabupaten Tanggamus Tahun 2016 Nomor 142, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tanggamus Nomor 47) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tanggamus Nomor 9 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tanggamus Nomor 08 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten

Tanggamus (Lembaran Daerah Kabupaten Tanggamus Tahun 202 Nomor 212, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tanggamus Nomor 102);

35. Peraturan Daerah Kabupaten Tanggamus Nomor 06 Tahun 2017 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Lembaran Daerah Kabupaten Tanggamus Tahun 2017 Nomor 151, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tanggamus Nomor 55) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tanggamus Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2017 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Lembaran Daerah Kabupaten Tanggamus Tahun 2023 Nomor 214, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tanggamus Nomor 103);
36. Peraturan Daerah Kabupaten Tanggamus Nomor 6 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tanggamus Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Tanggamus Tahun 2024 Nomor 219);
37. Peraturan Daerah Kabupaten Tanggamus Nomor 01 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanggamus Tahun 2024 Nomor 220, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tanggamus Nomor 106);
38. Peraturan Bupati Tanggamus Nomor 11 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2024-2026 (Berita Daerah Kabupaten Tanggamus Tahun 2023 Nomor 843);
39. Peraturan Bupati Tanggamus Nomor 57 Tahun 2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan Daerah (Berita Daerah Kabupaten Tanggamus Tahun 2018 Nomor 506);
40. Peraturan Bupati Tanggamus Nomor 22 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024 (Berita Daerah Kabupaten Tanggamus Tahun 2023 Nomor 854);
41. Peraturan Bupati Tanggamus Nomor 26 Tahun 2024 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Tanggamus Tahun 2022 Nomor 893);
42. Peraturan Bupati Tanggamus Nomor 23 Tahun 2024 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024 (Berita Daerah Kabupaten Tanggamus Tahun 2023 Nomor 890);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Tanggamus Tahun 2005-2025, Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2024-2026 Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Tanggamus Tahun 2024 yang berisi evaluasi hasil pelaksanaan Renja-PD sampai dengan triwulan II Tahun 2024 dan pendanaan/pagu indikatif.
- KETIGA : Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU disajikan dengan sistematika sebagai berikut :
- BAB I : Pendahuluan
 - BAB II : Evaluasi Pelaksanaan Renja-PD Tahun 2024 Sampai Dengan Triwulan II
 - BAB III : Rencana Program dan Kegiatan Dalam Perubahan Renja-PD
 - BAB IV : Penutup
- KEEMPAT : Lampiran sebagaimana dimaksud pada Diktum KETIGA merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kota Agung
pada tanggal 21 Agustus 2024

**KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN
PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN TANGGAMUS,**



MARADONA, S.STP., M.Si
NIP. 19790903 199810 1 001

KATA PENGANTAR

Tiada ungkapan yang pantas selain puji syukur ke Hadirat-Nya, sehingga kami dapat menerbitkan Buku Perubahan Rencana Kinerja Satuan Perangkat Daerah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanggamus Tahun 2024.

Perubahan Rencana Kinerja Satuan Perangkat Daerah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanggamus Tahun 2024 ini disusun sebagai salah satu bahan acuan penting dalam merumuskan lebih lanjut langkah-langkah operasional yang terkait dengan Administrasi Kependudukan Tahun 2024.

Dalam buku ini disampaikan secara singkat tentang landasan hukum, Tugas Pokok dan Fungsi, Visi, Misi, Maksud dan Tujuan serta Program Prioritas dan Unggulan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanggamus Tahun 2024.

Disadari bahwa buku ini belum sempurna, maka apabila ada saran perbaikan sangat kami harapkan dalam rangka penyempurnaannya. Oleh sebab itu saran dan kritik yang sifatnya konstruktif sangat kami harapkan dari semua pihak.

Akhirnya kepada semua pihak Kami ucapkan terimakasih atas bantuan dan dukungannya dalam penyelesaian Perubahan Renja tahun 2024 ini.

Kota Agung, 21 Agustus 2024

**KEPALA DINAS
KEPENDUDUKAN DAN
PENCATATAN SIPIL**



MARADONA, S.STP., M.Si
NIP. 19790903 199810 1 001

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL	iii
BAB I. PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Landasan Hukum	3
1.3. Maksud dan Tujuan	6
1.4. Sistematika Penulisan	7
BAB II. EVALUASI PELAKSANAAN RENJA – PD TAHUN 2022 SAMPAI DENGAN TRIWULAN IV	8
2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2023.....	8
2.2. Evaluasi Pelaksanaan Renja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2024.....	20
2.3. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah.....	38
2.4. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah.....	41
BAB III. RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN DALAM PERUBAHAN RENJA-PD	43
3.1 Telahaan Kebijakan Nasional.....	43
3.2 Tujuan dan Sasaran Perubahan Renja – PD.....	61
3.3 Program dan Kegiatan.....	61
BAB IV. PENUTUP	96

DAFTAR TABEL

Tabel 1. EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RENJA PD TAHUN 2023 SAMPAI DENGAN TRIWULAN IV TAHUN 2023 KABUPATEN TANGGAMUS.....	32
Tabel 2. PENCAPAIAN KINERJA PELAYANAN PD DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN TANGGAMUS	40
Tabel 3. IDENTIFIKASI KEBIJAKAN NASIONAL DAN PROVINSI KABUPATEN TANGGAMUS.....	60
Tabel 4. RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PADA PERUBAHAN RENJA PD TAHUN 2023 KABUPATEN TANGGAMUS.....	71
Tabel 5. RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PADA PERUBAHAN RENJA PD TAHUN 2023 KABUPATEN TANGGAMUS SUMBER DANA APBD PROVINSI LAMPUNG.....	84
Tabel 6. RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PADA PERUBAHAN RENJA PD TAHUN 2023 KABUPATEN TANGGAMUS SUMBER DANA APBN.....	85
Tabel 7. RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH PADA PERUBAHAN RENJA PD TAHUN 2023 KABUPATEN TANGGAMUS SUMBER DANA APBD KABUPATEN, APBD PROVINSI DAN APBN.....	86

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN
PENCATATAN SIPIL KABUPATEN TANGGAMUS
NOMOR : 050/1769 /26/2024
TENTANG
PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT
DAERAH TAHUN 2024 DINAS KEPENDUDUKAN DAN
PENCATATAN SIPIL KABUPATEN TANGGAMUS

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah.

Dengan adanya Otonomi Daerah tentunya diharapkan Pemerintahan Daerah mampu meningkatkan daya saing melalui prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan dalam pembangunan, meningkatkan daya guna, potensi dan keanekaragaman sumberdaya daerah.

Dalam pelayanan dan mekanisme Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil saat ini Pelaksananya sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang administrasi kependudukan, Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang tatacara pendaftaran penduduk dan pencatatan Sipil. Peraturan

Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2019 tentang pelayanan administrasi kependudukan secara daring.

Agar berbagai program dan kegiatan yang akan dilaksanakan dimasa yang akan datang dapat berhasil dengan baik, maka harus disusun dalam suatu perencanaan yang mendatang. Perencanaan yang disusun harus mempertimbangkan keadaan yang ada dan memprediksi keadaan yang akan datang dengan berbagai dukungan dan hambatan yang mungkin timbul.

Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2024- 2026 merupakan penjabaran program selama 3 tahun kedepan yang melalui setiap tahapan dari proses pembangunan berkelanjutan dari tahun ke tahun di bidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil, dan mengingat pembangunan Nasional maka Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2024 -2026 disinkronkan dengan Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Tanggamus Tahun 2024 – 2026. Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2024 – 2026 pelaksanaannya akan dituangkan dalam Rencana Kerja Tahunan (RKT) setiap tahun selama 3 tahun, yang kemudian menjadi dasar dalam penyusunan Anggaran Belanja Pendapatan Daerah (APBD) setiap tahunnya.

Hal ini menunjukkan bahwa dokumen perencanaan saling berkaitan satu dengan yang lainnya baik antar waktu maupun antar tingkatan perencanaan, dengan demikian pembangunan di bidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil bersifat berkelanjutan dan saling terkait secara sektoral maupun wilayah.

Suatu perencanaan pembangunan apapun bentuknya akan berhasil mencapai sasaran yang diharapkan terkait dengan data kependudukan yang

baik dan akurat. Dengan demikian pembangunan sektor Kependudukan dan Pencatatan Sipil merupakan barometer bagi perencanaan pembangunan sektor lainnya

1.2. Landasan Hukum

Landasan Hukum yang menjadi acuan dalam penyusunan Renja Perubahan adalah :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1997 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Tulang Bawang dan Kabupaten Daerah Tingkat II Tanggamus ;
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional ;
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025 ;
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 ;
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah ;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pelaksanaan Pembangunan ;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal ;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah ;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah ;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Harmonisasi Kebijakan Fiskal Nasional ;
13. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 ;
14. Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan ;

15. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Harmonisasi Kebijakan Fiskal Nasional ;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah ;
17. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor : 29/PRT/M/2018 tentang Standar Teknis Standar Pelayanan Minimal Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat ;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 101 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Sub Urusan Bencana Daerah Kabupaten/Kota ;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Sub Urusan Kebakaran Daerah Kabupaten/Kota ;
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 121 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Mutu Pelayanan Dasar Sub Urusan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Di Provinsi dan Kabupaten/Kota ;
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah ;
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal ;
24. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 32 Tahun 2022 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan ;
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024 ;
26. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 13 Tahun 2023 tentang Standar Teknis Standar Pelayanan Minimal Bidang Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat ;

27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 ;
28. Keputusan Menteri Dalam Negeri 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah ;
29. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 6 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Lampung Tahun 2005–2025 ;
30. Peraturan Gubernur Lampung Nomor 15 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Lampung Tahun 2024 ;
31. Peraturan Gubernur Lampung Nomor 55 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Lampung Tahun 2025-2026 ;
32. Peraturan Daerah Kabupaten Tanggamus Nomor 01 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten Tanggamus Tahun 2005-2025 ;
33. Peraturan Daerah Kabupaten Tanggamus Nomor 16 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Tanggamus Tahun 2011-2031 ;
34. Peraturan Daerah Kabupaten Tanggamus Nomor 08 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tanggamus sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tanggamus Nomor 9 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tanggamus Nomor 08 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tanggamus ;
35. Peraturan Daerah Kabupaten Tanggamus Nomor 06 Tahun 2017 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tanggamus Nomor 1 Tahun 2023 tentang

- Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2017 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan ;
36. Peraturan Daerah Kabupaten Tanggamus Nomor 6 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tanggamus Tahun Anggaran 2024 ;
 37. Peraturan Daerah Kabupaten Tanggamus Nomor 01 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah ;
 38. Peraturan Bupati Tanggamus Nomor 11 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2024-2026 ;
 39. Peraturan Bupati Tanggamus Nomor 57 Tahun 2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan Daerah ;
 40. Peraturan Bupati Tanggamus Nomor 22 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024 ;
 41. Peraturan Bupati Tanggamus Nomor 26 Tahun 2024 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 ;
 42. Peraturan Bupati Tanggamus Nomor 23 Tahun 2024 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024

1.3. Maksud dan Tujuan .

1.3.1. Maksud

Maksud penyusunan Perubahan Renja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2024 adalah sebagai dokumen arah perencanaan Pembangunan yang memberikan arah kebijakan keuangan, strategi dan kebijakan, program dan sasaran – sasaran strategi yang ingin dicapai selama 1 tahun mendatang.

1.3.2. Tujuan

Tujuan dari penyusunan Perubahan Renja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil ini adalah untuk menjabarkan Capaian Anggaran dan Capaian Kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanggamus Tahun 2024.

1.4. Sistematika Penulisan

Sistematika Penulisan dokumen Perubahan Renja PD Tahun Anggaran 2024 ini terbagi dalam 4 (empat) BAB, dengan rincian sebagai berikut :

Kata Pengantar

Daftar Isi

Daftar Tabel

A. BAB I Pendahuluan

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penulisan

B. BAB II Evaluasi Pelaksanaan Renja-PD Tahun 2023 Sampai Dengan Triwulan IV

- 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja-PD Tahun 2023
- 2.2 Evaluasi Pelaksanaan Renja-PD Tahun 2024
- 2.3 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
- 2.4 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

C. BAB III Rencana Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Dalam Perubahan Renja-PD

- 3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional
- 3.2 Tujuan dan Sasaran Perubahan Renja-PD
- 3.3 Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan

D. BAB IV Penutup

BAB II
EVALUASI PELAKSANAAN RENJA – PD TAHUN 2023 SAMPAI
DENGAN TRIWULAN IV

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2023

Pada Tahun 2023 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil melaksanakan 5 Program, 9 Kegiatan dan 25 Sub kegiatan dengan Belanja Operasi sebesar Rp.7.842.716.856,00 dan Belanja Modal sebesar Rp.239.264.500,00 dengan total Belanja Daerah Rp.8.081.981.356,00 yang teralisasi sebesar Rp.6.471.524.408,00 atau 80,07 % sampai dengan triwulan ke IV.

Secara terinci Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan yang dilaksanakan pada Tahun Anggaran 2023 dijabarkan sebagai berikut :

- 1) Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kab/Kota, Pelaksanaan kegiatan ini berlokasi di Kecamatan Kotaagung Timur dengan pencapaian kinerja sampai dengan triwulan ke IV tahun 2023 yaitu 100% dengan pencapaian kinerja sebesar 86,96% dengan anggaran sebesar Rp.8.077.156.656,00 yang terealisasi sebesar Rp.6.471.374.408,00 atau 80,12% dengan rincian 5 Kegiatan dan 21 Sub Kegiatan sebagai berikut :
 - a) Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah, Pelaksanaan kegiatan ini berlokasi di Kecamatan Kotaagung Timur dengan

pencapaian kinerja sampai dengan triwulan ke IV tahun 2023 yaitu 100% dengan pencapaian kinerja sebesar 93,75% dengan anggaran sebesar Rp.4.476.700,00 yang terealisasi sebesar Rp.1.010.000,00 atau 22,56%, Kegiatan ini terdiri dari 7 Sub Kegiatan dengan rincian Sub Kegiatan sebagai berikut :

- 1.) Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah, Pelaksanaan kegiatan ini berlokasi di Kecamatan Kotaagung Timur dengan pencapaian kinerja sampai dengan triwulan ke IV tahun 2023 yaitu 3 Dokumen dengan pencapaian kinerja sebesar 2 Dokumen dengan anggaran sebesar Rp. 2.151.700,00 yang terealisasi sebesar Rp. 1.010.000,00 atau 46,94%
- 2.) Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD Pelaksanaan kegiatan ini berlokasi di Kecamatan Kotaagung Timur dengan pencapaian kinerja sampai dengan triwulan ke IV tahun 2023 yaitu 1 Dokumen dengan pencapaian kinerja sebesar 1 Dokumen dengan anggaran sebesar Rp. 375.000,00 yang terealisasi sebesar Rp.0 atau 0%
- 3.) Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD Pelaksanaan kegiatan ini berlokasi di Kecamatan Kotaagung Timur dengan pencapaian kinerja sampai dengan triwulan ke IV tahun 2023 yaitu 1 Dokumen dengan pencapaian kinerja sebesar 1 Dokumen dengan anggaran sebesar Rp. 375.000,00 yang terealisasi sebesar Rp.0 atau 0%

- 4.) Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD
Pelaksanaan kegiatan ini berlokasi di Kecamatan Kotaagung Timur dengan pencapaian kinerja sampai dengan triwulan ke IV tahun 2023 yaitu 1 Dokumen dengan pencapaian kinerja sebesar 1 Dokumen dengan anggaran sebesar Rp. 375.000,00 yang terealisasi sebesar Rp.0 atau 0%
- 5.) Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD
Pelaksanaan kegiatan ini berlokasi di Kecamatan Kotaagung Timur dengan pencapaian kinerja sampai dengan triwulan ke IV tahun 2023 yaitu 1 Dokumen dengan pencapaian kinerja sebesar 1 Dokumen dengan anggaran sebesar Rp. 600.000,00 yang terealisasi sebesar Rp.0 atau 0%
- 6.) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
Pelaksanaan kegiatan ini berlokasi di Kecamatan Kotaagung Timur dengan pencapaian kinerja sampai dengan triwulan ke IV tahun 2023 yaitu 6 Laporan dengan pencapaian kinerja sebesar 6 Laporan dengan anggaran sebesar Rp. 225.000,00 yang terealisasi sebesar Rp.0,00 atau 0%
- 7.) Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah, Pelaksanaan kegiatan ini berlokasi di Kecamatan Kotaagung Timur dengan pencapaian kinerja sampai dengan triwulan ke IV tahun 2023 yaitu 3 Laporan dengan pencapaian kinerja sebesar 3 Laporan dengan anggaran sebesar Rp. 375.000,00 yang terealisasi sebesar Rp. 0 atau 0%

b) Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah, Pelaksanaan kegiatan ini berlokasi di Kecamatan Kotaagung Timur dengan pencapaian kinerja sampai dengan triwulan ke IV tahun 2023 yaitu 100% dengan pencapaian kinerja sebesar 100 % dengan anggaran sebesar Rp.6.055.085,116 yang terealisasi sebesar Rp.5.703.220.416,00 atau 94,19 %, Kegiatan ini terdiri dari 3 Sub Kegiatan dengan rincian Sub Kegiatan sebagai berikut :

1.) Penyediaan Gaji dan Tunjangan, Pelaksanaan kegiatan ini berlokasi di Kecamatan Kotaagung Timur dengan pencapaian kinerja sampai dengan triwulan ke IV tahun 2023 yaitu 34 Orang dengan pencapaian kinerja sebesar 34 Orang dengan anggaran sebesar Rp.4.415.915.116,00 yang terealisasi sebesar Rp.4.173.235.416,00 atau 94,50%

2.) Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN, Pelaksanaan kegiatan ini berlokasi di Kecamatan Kotaagung Timur dengan pencapaian kinerja sampai dengan triwulan ke IV tahun 2023 yaitu 12 Dokumen dengan pencapaian kinerja sebesar 12 Dokumen dengan anggaran sebesar Rp. 1.624.310.000,00 yang terealisasi sebesar Rp. 1.526.635.000,00 atau 93,99%

3.) Pelaksanaan Penatausahaan dan Penguji/Verifikasi Keuangan SKPD, Pelaksanaan kegiatan ini berlokasi di Kecamatan Kotaagung Timur dengan

pencapaian kinerja sampai dengan triwulan ke IV tahun 2023 yaitu 12 Dokumen dengan pencapaian kinerja sebesar 12 Dokumen dengan anggaran sebesar Rp.14.860.000,00 yang terealisasi sebesar Rp. 3.350.000,00 atau 22,54%

c) Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah, Pelaksanaan kegiatan ini berlokasi di Kecamatan Kotaagung Timur dengan pencapaian kinerja sampai dengan triwulan ke IV tahun 2023 yaitu 100% dengan pencapaian kinerja sebesar 80% dengan anggaran sebesar Rp.303.853.440,00 yang terealisasi sebesar Rp.170.650.610,00 atau 56,16%, Kegiatan ini terdiri dari 4 Sub Kegiatan dengan rincian Sub Kegiatan sebagai berikut :

1.) Penyediaan Bahan Logistik Kantor, Pelaksanaan kegiatan ini berlokasi di Kecamatan Kotaagung Timur dengan pencapaian kinerja sampai dengan triwulan ke IV tahun 2023 yaitu 1 Paket dengan pencapaian kinerja sebesar 1 Paket dengan anggaran sebesar Rp.39.093.000,00 yang terealisasi sebesar Rp.4.200.000,00 atau 10,74%

2.) Penyediaan Baran Cetakan dan Penggandaan, Pelaksanaan kegiatan ini berlokasi di Kecamatan Kotaagung Timur dengan pencapaian kinerja sampai dengan triwulan ke IV tahun 2023 yaitu 1 Paket dengan pencapaian kinerja sebesar 1 Paket dengan anggaran sebesar Rp.25.311.400,00 yang terealisasi sebesar Rp.13.311.400,00 atau 52,59%

- 3.) Penyediaan Bahan/Material, Pelaksanaan kegiatan ini berlokasi di Kecamatan Kotaagung Timur dengan pencapaian kinerja sampai dengan triwulan ke IV tahun 2023 yaitu 1 Paket dengan pencapaian kinerja sebesar 1 Paket dengan anggaran sebesar Rp.88.021.040,00 yang terealisasi sebesar Rp.56.046.100,00 atau 63,67%
- 4.) Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD, Pelaksanaan kegiatan ini berlokasi di Kecamatan Kotaagung Timur dengan pencapaian kinerja sampai dengan triwulan ke IV tahun 2023 yaitu 27 laporan dengan pencapaian kinerja sebesar 21 laporan dengan anggaran sebesar Rp.151.428.000,00 yang terealisasi sebesar Rp.97.093.110,00 atau 64,12%
- d) Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah, Pelaksanaan kegiatan ini berlokasi di Kecamatan Kotaagung Timur dengan pencapaian kinerja sampai dengan triwulan ke IV tahun 2023 yaitu 100% dengan pencapaian kinerja sebesar 88,24% dengan anggaran sebesar Rp.1.491.466.600,00 yang terealisasi sebesar Rp.436.192.297,00 atau 29,25%, Kegiatan ini terdiri dari 3 Sub Kegiatan dengan rincian Sub Kegiatan sebagai berikut :
- 1.) Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik, Pelaksanaan kegiatan ini berlokasi di Kecamatan Kotaagung Timur dengan pencapaian

kinerja sampai dengan triwulan ke IV tahun 2023 yaitu 12 Laporan dengan pencapaian kinerja sebesar 12 Laporan dengan anggaran sebesar Rp.202.066.500,00 yang terealisasi sebesar Rp.155.081.397,00 atau 76,75%

2.) Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor, Pelaksanaan kegiatan ini berlokasi di Kecamatan Kotaagung Timur dengan pencapaian kinerja sampai dengan triwulan ke IV tahun 2023 yaitu 10 Laporan dengan pencapaian kinerja sebesar 6 Laporan dengan anggaran sebesar Rp.1.190.877.100,00 yang terealisasi sebesar Rp.202.675.700,00 atau 17,02%

3.) Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor, Pelaksanaan kegiatan ini berlokasi di Kecamatan Kotaagung Timur dengan pencapaian kinerja sampai dengan triwulan ke IV tahun 2023 yaitu 12 Laporan dengan pencapaian kinerja sebesar 12 Laporan dengan anggaran sebesar Rp.98.523.000,00 yang terealisasi sebesar Rp.78.435.200,00 atau 79,61%

e) Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah, Pelaksanaan kegiatan ini berlokasi di Kecamatan Kotaagung Timur dengan pencapaian kinerja sampai dengan triwulan ke IV tahun 2023 yaitu 100% dengan pencapaian kinerja sebesar 91,67% dengan anggaran sebesar Rp.222.274.800,00 yang terealisasi sebesar

Rp.160.301.085,00 atau 72,12%, Kegiatan ini terdiri dari 4 Sub Kegiatan dengan rincian Sub Kegiatan sebagai berikut :

- 1.) Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan, Pelaksanaan kegiatan ini berlokasi di Kecamatan Kotaagung Timur dengan pencapaian kinerja sampai dengan triwulan ke IV tahun 2023 yaitu 1 Unit dengan pencapaian kinerja sebesar 1 Unit dengan anggaran sebesar Rp.34.538.000,00 yang terealisasi sebesar Rp. 23.274.000,00 atau 67,39%
- 2.) Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan, Pelaksanaan kegiatan ini berlokasi di Kecamatan Kotaagung Timur dengan pencapaian kinerja sampai dengan triwulan ke IV tahun 2023 yaitu 5 Unit dengan pencapaian kinerja sebesar 5 Unit dengan anggaran sebesar Rp.122.603.800,00 yang terealisasi sebesar Rp. 96.674.085,00 atau 78,85%
- 3.) Pemeliharaan dan Peralatan Mesin Lainnya, Pelaksanaan kegiatan ini berlokasi di Kecamatan Kotaagung Timur dengan pencapaian kinerja sampai dengan triwulan ke IV tahun 2023 yaitu 39 Unit dengan pencapaian kinerja sebesar 26 Unit dengan anggaran sebesar Rp. 43.320.000,00 yang terealisasi sebesar Rp.18.540.000,00 atau 42,80%

- 4.) Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya, Pelaksanaan kegiatan ini berlokasi di Kecamatan Kotaagung Timur dengan pencapaian kinerja sampai dengan triwulan ke IV tahun 2023 yaitu 1 Unit dengan pencapaian kinerja sebesar 1 Unit dengan anggaran sebesar Rp.21.813.000,00 yang terealisasi sebesar Rp. 21.813.000,00 atau 100%
- 2) Program Pendaftaran Penduduk, Pelaksanaan kegiatan ini berlokasi di Kecamatan Kotaagung Timur dengan pencapaian kinerja sampai dengan triwulan ke IV tahun 2023 yaitu 100% dengan pencapaian kinerja sebesar 100% dengan anggaran sebesar Rp.348.900,00 yang terealisasi sebesar Rp.0,00 atau 0% dengan rincian 1 Kegiatan dan 1 Sub Kegiatan sebagai berikut :
- a) Kegiatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk, Pelaksanaan kegiatan ini berlokasi di Kecamatan Kotaagung Timur dengan pencapaian kinerja sampai dengan triwulan ke IV tahun 2023 yaitu 100% dengan pencapaian kinerja sebesar 100% dengan anggaran sebesar Rp.348.900,00 yang terealisasi sebesar Rp.0,00 atau 0%, Kegiatan ini terdiri dari 1 Sub Kegiatan dengan rincian Sub Kegiatan sebagai berikut :
- 1.) Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk, Pelaksanaan kegiatan ini berlokasi di Kecamatan Kotaagung Timur dengan pencapaian kinerja sampai dengan triwulan ke IV tahun 2023 yaitu 12

Laporan dengan pencapaian kinerja sebesar 12
Laporan dengan anggaran sebesar Rp.348.900,00
yang terealisasi sebesar Rp.0,00 atau 0%

- 3) Program Pencatatan Sipil, Pelaksanaan kegiatan ini berlokasi di Kecamatan Kotaagung Timur dengan pencapaian kinerja sampai dengan triwulan ke IV tahun 2023 yaitu 100% dengan pencapaian kinerja sebesar 117,71% dengan anggaran sebesar Rp. 1.011.500,00 yang terealisasi sebesar Rp. 0 atau 0% dengan rincian 1 Kegiatan dan 1 Sub Kegiatan sebagai berikut :
 - a) Kegiatan Pelayanan Pencatatan Sipil, Pelaksanaan kegiatan ini berlokasi di Kecamatan Kotaagung Timur dengan pencapaian kinerja sampai dengan triwulan ke IV tahun 2023 yaitu 100% dengan pencapaian kinerja sebesar 117,71% dengan anggaran sebesar Rp. 1.011.500,00 yang terealisasi sebesar Rp.0 atau 0%, Kegiatan ini terdiri dari 1 Sub Kegiatan dengan rincian Sub Kegiatan sebagai berikut :
 - 1.) Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas Pelaporan Peristiwa Penting, Pelaksanaan kegiatan ini berlokasi di Kecamatan Kotaagung Timur dengan pencapaian kinerja sampai dengan triwulan ke IV tahun 2023 yaitu 4.200 Dokumen dengan pencapaian kinerja sebesar 4.944 Dokumen dengan anggaran sebesar Rp. 1.011.500,00 yang terealisasi sebesar Rp.0 atau 0%

4) Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan, Pelaksanaan kegiatan ini berlokasi di Kecamatan Kotaagung Timur dengan pencapaian kinerja sampai dengan triwulan ke IV tahun 2023 yaitu 100% dengan pencapaian kinerja sebesar 84,62% dengan anggaran sebesar Rp.1.604.300,00 yang terealisasi sebesar Rp.150.000,00 atau 9,35% dengan rincian dengan 1 Kegiatan dan 1 Sub Kegiatan sebagai berikut :

a.) Kegiatan Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan Penyajian Database Kependudukan, Pelaksanaan kegiatan ini berlokasi di Kecamatan Kotaagung Timur dengan pencapaian kinerja sampai dengan triwulan ke IV tahun 2023 yaitu 100% dengan pencapaian kinerja sebesar 84,62% dengan anggaran sebesar Rp.1.604.300,00 yang terealisasi sebesar Rp.150.000,00 atau 9,35%, Kegiatan ini terdiri dari 1 Sub Kegiatan dengan rincian Sub Kegiatan sebagai berikut :

1.) Kerjasama Pemanfaatan Data kependudukan, Pelaksanaan kegiatan ini berlokasi di Kecamatan Kotaagung Timur dengan pencapaian kinerja sampai dengan triwulan ke IV tahun 2023 yaitu 13 Dokumen dengan pencapaian kinerja sebesar 11 Dokumen dengan anggaran sebesar Rp. 1.604.300,00 yang terealisasi sebesar Rp.150.000,00 atau 9,35%

5) Program Pengelolaan profil Kependudukan, Pelaksanaan kegiatan ini berlokasi di Kecamatan Kotaagung Timur dengan pencapaian kinerja sampai dengan triwulan ke IV tahun 2023 yaitu 100% dengan pencapaian kinerja sebesar 66,67% dengan anggaran sebesar Rp.1.860.000,00 yang terealisasi sebesar Rp.0,00 atau 0% dengan rincian 1 Kegiatan dan 1 Sub Kegiatan sebagai berikut :

a) Kegiatan Penyusunan Profil Kependudukan, Pelaksanaan kegiatan ini berlokasi di Kecamatan Kotaagung Timur dengan pencapaian kinerja sampai dengan triwulan ke IV tahun 2023 yaitu 100% dengan pencapaian kinerja sebesar 66,67% dengan anggaran sebesar Rp.1.860.000,00 yang terealisasi sebesar Rp.0 atau 0%, Kegiatan ini terdiri dari 1 Sub Kegiatan dengan rincian Sub Kegiatan sebagai berikut :

1).Penyediaan Data Kependudukan Kabupaten/Kota, Pelaksanaan kegiatan ini berlokasi di Kecamatan Kotaagung Timur dengan pencapaian kinerja sampai dengan triwulan ke IV tahun 2023 yaitu 6 Dokumen dengan pencapaian kinerja sebesar 4 Dokumen dengan anggaran sebesar Rp.1.860.000,00 yang terealisasi sebesar Rp.0,00 atau 0%

2.2. Evaluasi Pelaksanaan Renja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2024

Pada Tahun 2024 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil melaksanakan 5 Program, 9 Kegiatan dan 25 Sub kegiatan dengan Belanja Operasi sebesar Rp.8.711.109.705,00 dan Belanja Modal sebesar Rp.520.090.000,00 dengan total Belanja Daerah Rp.9.231.199.705,00 yang teralisasi sebesar Rp.4.596.196.875,00 atau 49,79% sampai dengan triwulan ke II. Secara terinci Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan yang dilaksanakan pada Tahun Anggaran 2024 dijabarkan sebagai berikut :

- 1) Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kab/Kota, Pelaksanaan kegiatan ini berlokasi di Kecamatan Kotaagung Timur dengan pencapaian kinerja sampai dengan triwulan ke II tahun 2024 yaitu 100% dengan pencapaian kinerja sebesar 67,48% dengan anggaran sebesar Rp.9.226.915.005,00 yang terealisasi sebesar Rp. 4.596.196.875,00 atau 49,81% dengan rincian 5 Kegiatan dan 21 Sub Kegiatan sebagai berikut :
 - a) Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah, Pelaksanaan kegiatan ini berlokasi di Kecamatan Kotaagung Timur dengan pencapaian kinerja sampai dengan triwulan ke II tahun 2024 yaitu 100% dengan pencapaian kinerja sebesar 64,29% dengan anggaran sebesar Rp.6.391.400,00 yang terealisasi sebesar Rp.0,00 atau 0%, Kegiatan ini terdiri dari 7 Sub Kegiatan dengan rincian Sub Kegiatan sebagai berikut :

- 1.) Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah, Pelaksanaan kegiatan ini berlokasi di Kecamatan Kotaagung Timur dengan pencapaian kinerja sampai dengan triwulan ke II tahun 2024 yaitu 3 Dokumen dengan pencapaian kinerja sebesar 3 Dokumen dengan anggaran sebesar Rp. 2.773.700,00 yang terealisasi sebesar Rp.0,00 atau 0%
- 2.) Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD Pelaksanaan kegiatan ini berlokasi di Kecamatan Kotaagung Timur dengan pencapaian kinerja sampai dengan triwulan ke II tahun 2024 yaitu 1 Dokumen dengan pencapaian kinerja sebesar 1 Dokumen dengan anggaran sebesar Rp.750.000,00 yang terealisasi sebesar Rp.0 atau 0%
- 3.) Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD Pelaksanaan kegiatan ini berlokasi di Kecamatan Kotaagung Timur dengan pencapaian kinerja sampai dengan triwulan ke II tahun 2024 yaitu 1 Dokumen dengan pencapaian kinerja sebesar 0 Dokumen dengan anggaran sebesar Rp. 645.000,00 yang terealisasi sebesar Rp.0 atau 0%
- 4.) Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD Pelaksanaan kegiatan ini berlokasi di Kecamatan Kotaagung Timur dengan pencapaian kinerja sampai dengan triwulan ke II tahun 2024 yaitu 1 Dokumen dengan pencapaian kinerja sebesar 1 Dokumen dengan anggaran sebesar Rp.600.000,00 yang terealisasi sebesar Rp.0 atau 0%

- 5.) Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD
Pelaksanaan kegiatan ini berlokasi di Kecamatan Kotaagung Timur dengan pencapaian kinerja sampai dengan triwulan ke II tahun 2024 yaitu 1 Dokumen dengan pencapaian kinerja sebesar 0 Dokumen dengan anggaran sebesar Rp. 660.900,00 yang terealisasi sebesar Rp.0 atau 0%
 - 6.) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
Pelaksanaan kegiatan ini berlokasi di Kecamatan Kotaagung Timur dengan pencapaian kinerja sampai dengan triwulan ke II tahun 2024 yaitu 6 Laporan dengan pencapaian kinerja sebesar 3 Laporan dengan anggaran sebesar Rp. 660.900,00 yang terealisasi sebesar Rp.0,00 atau 0%
 - 7.) Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah, Pelaksanaan kegiatan ini berlokasi di Kecamatan Kotaagung Timur dengan pencapaian kinerja sampai dengan triwulan ke II tahun 2024 yaitu 3 Laporan dengan pencapaian kinerja sebesar 3 Laporan dengan anggaran sebesar Rp.300.900,00 yang terealisasi sebesar Rp. 0 atau 0%
- b) Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah, Pelaksanaan kegiatan ini berlokasi di Kecamatan Kotaagung Timur dengan pencapaian kinerja sampai dengan triwulan ke II tahun 2024 yaitu 100% dengan pencapaian kinerja sebesar 66,67% dengan anggaran sebesar Rp.6.016.215.151,00 yang terealisasi sebesar

Rp.2.875.669.659,00 atau 47,80%, Kegiatan ini terdiri dari 3 Sub Kegiatan dengan rincian Sub Kegiatan sebagai berikut :

- 1.) Penyediaan Gaji dan Tunjangan, Pelaksanaan kegiatan ini berlokasi di Kecamatan Kotaagung Timur dengan pencapaian kinerja sampai dengan triwulan ke II tahun 2024 yaitu 34 Orang dengan pencapaian kinerja sebesar 34 Orang dengan anggaran sebesar Rp.4.390.155.151,00 yang terealisasi sebesar Rp.2.094.369.659,00 atau 47,71%
- 2.) Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN, Pelaksanaan kegiatan ini berlokasi di Kecamatan Kotaagung Timur dengan pencapaian kinerja sampai dengan triwulan ke II tahun 2024 yaitu 12 Dokumen dengan pencapaian kinerja sebesar 6 Dokumen dengan anggaran sebesar Rp. 1.595.500.000,00 yang terealisasi sebesar Rp.751.600.000,00 atau 47,11%
- 3.) Pelaksanaan Penatausahaan dan Penguji/Verifikasi Keuangan SKPD, Pelaksanaan kegiatan ini berlokasi di Kecamatan Kotaagung Timur dengan pencapaian kinerja sampai dengan triwulan ke II tahun 2024 yaitu 12 Dokumen dengan pencapaian kinerja sebesar 6 Dokumen dengan anggaran sebesar Rp.30.560.000,00 yang terealisasi sebesar Rp.29.700.000,00 atau 97,19%

c) Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah, Pelaksanaan kegiatan ini berlokasi di Kecamatan Kotaagung Timur dengan pencapaian kinerja sampai dengan triwulan ke II tahun 2024 yaitu 100% dengan pencapaian kinerja sebesar 95,50% dengan anggaran sebesar Rp.221.654.600,00 yang terealisasi sebesar Rp.128.454.370,00 atau 57,95%, Kegiatan ini terdiri dari 4 Sub Kegiatan dengan rincian Sub Kegiatan sebagai berikut :

- 1.) Penyediaan Bahan Logistik Kantor, Pelaksanaan kegiatan ini berlokasi di Kecamatan Kotaagung Timur dengan pencapaian kinerja sampai dengan triwulan ke II tahun 2024 yaitu 1 Paket dengan pencapaian kinerja sebesar 1 Paket dengan anggaran sebesar Rp.57.880.800,00 yang terealisasi sebesar Rp.19.748.800,00 atau 34,12%
- 2.) Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan, Pelaksanaan kegiatan ini berlokasi di Kecamatan Kotaagung Timur dengan pencapaian kinerja sampai dengan triwulan ke II tahun 2024 yaitu 1 Paket dengan pencapaian kinerja sebesar 1 Paket dengan anggaran sebesar Rp.31.530.800,00 yang terealisasi sebesar Rp.28.413.000,00 atau 90,11%
- 3.) Penyediaan Bahan/Material, Pelaksanaan kegiatan ini berlokasi di Kecamatan Kotaagung Timur dengan pencapaian kinerja sampai dengan triwulan ke II tahun 2024 yaitu 2 Paket dengan pencapaian kinerja sebesar 1 Paket dengan anggaran sebesar

Rp.40.999.000,00 yang terealisasi sebesar Rp.26.599.000,00 atau 64,88%

4.) Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD, Pelaksanaan kegiatan ini berlokasi di Kecamatan Kotaagung Timur dengan pencapaian kinerja sampai dengan triwulan ke II tahun 2024 yaitu 25 laporan dengan pencapaian kinerja sebesar 33 laporan dengan anggaran sebesar Rp.91.244.000,00 yang terealisasi sebesar Rp.53.693.570,00 atau 58,85%

d) Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah, Pelaksanaan kegiatan ini berlokasi di Kecamatan Kotaagung Timur dengan pencapaian kinerja sampai dengan triwulan ke II tahun 2024 yaitu 100% dengan pencapaian kinerja sebesar 55,79% dengan anggaran sebesar Rp.2.734.820.054,00 yang terealisasi sebesar Rp.1.525.704.446,00 atau 50%, Kegiatan ini terdiri dari 3 Sub Kegiatan dengan rincian Sub Kegiatan sebagai berikut :

1.) Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik, Pelaksanaan kegiatan ini berlokasi di Kecamatan Kotaagung Timur dengan pencapaian kinerja sampai dengan triwulan ke II tahun 2024 yaitu 12 Laporan dengan pencapaian kinerja sebesar 6 Laporan dengan anggaran sebesar Rp.200.407.000,00 yang terealisasi sebesar Rp.55.356.196,00 atau 27,62%

- 2.) Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor, Pelaksanaan kegiatan ini berlokasi di Kecamatan Kotaagung Timur dengan pencapaian kinerja sampai dengan triwulan ke II tahun 2024 yaitu 12 Laporan dengan pencapaian kinerja sebesar 6 Laporan dengan anggaran sebesar Rp.2.424.813.054,00 yang terealisasi sebesar Rp.1.404.891.750,00 atau 57,94%
- 3.) Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor, Pelaksanaan kegiatan ini berlokasi di Kecamatan Kotaagung Timur dengan pencapaian kinerja sampai dengan triwulan ke II tahun 2024 yaitu 12 Laporan dengan pencapaian kinerja sebesar 6 Laporan dengan anggaran sebesar Rp.109.600.000,00 yang terealisasi sebesar Rp.65.456.500,00 atau 59,72%
- e) Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah, Pelaksanaan kegiatan ini berlokasi di Kecamatan Kotaagung Timur dengan pencapaian kinerja sampai dengan triwulan ke II tahun 2024 yaitu 100% dengan pencapaian kinerja sebesar 60,94% dengan anggaran sebesar Rp.247.833.800,00 yang terealisasi sebesar Rp.66.368.400,00 atau 26,78%, Kegiatan ini terdiri dari 4 Sub Kegiatan dengan rincian Sub Kegiatan sebagai berikut :
- 1.) Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan

Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan, Pelaksanaan kegiatan ini berlokasi di Kecamatan Kotaagung Timur dengan pencapaian kinerja sampai dengan triwulan ke II tahun 2024 yaitu 1 Unit dengan pencapaian kinerja sebesar 1 Unit dengan anggaran sebesar Rp.23.274.000,00 yang terealisasi sebesar Rp.14.080.000,00 atau 60,50%

2.) Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan, Pelaksanaan kegiatan ini berlokasi di Kecamatan Kotaagung Timur dengan pencapaian kinerja sampai dengan triwulan ke II tahun 2024 yaitu 5 Unit dengan pencapaian kinerja sebesar 5 Unit dengan anggaran sebesar Rp.147.940.800,00 yang terealisasi sebesar Rp.39.478.400,00 atau 25,69%

3.) Pemeliharaan dan Peralatan Mesin Lainnya, Pelaksanaan kegiatan ini berlokasi di Kecamatan Kotaagung Timur dengan pencapaian kinerja sampai dengan triwulan ke II tahun 2024 yaitu 48 Unit dengan pencapaian kinerja sebesar 21 Unit dengan anggaran sebesar Rp.47.810.000,00 yang terealisasi sebesar Rp.12.810.000,00 atau 25,79%

4.) Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya, Pelaksanaan kegiatan ini berlokasi di Kecamatan Kotaagung Timur dengan pencapaian kinerja sampai dengan triwulan ke II tahun 2024 yaitu 1 Gedung dengan pencapaian

kinerja sebesar 0 Gedung dengan anggaran sebesar Rp.28.809.000,00 yang terealisasi sebesar Rp.0,00 atau 0%

2) Program Pendaftaran Penduduk, Pelaksanaan kegiatan ini berlokasi di Kecamatan Kotaagung Timur dengan pencapaian kinerja sampai dengan triwulan ke II tahun 2024 yaitu 100% dengan pencapaian kinerja sebesar 50% dengan anggaran sebesar Rp.348.900,00 yang terealisasi sebesar Rp.0,00 atau 0% dengan rincian 1 Kegiatan dan 1 Sub Kegiatan sebagai berikut :

a) Kegiatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk, Pelaksanaan kegiatan ini berlokasi di Kecamatan Kotaagung Timur dengan pencapaian kinerja sampai dengan triwulan ke II tahun 2024 yaitu 100% dengan pencapaian kinerja sebesar 50% dengan anggaran sebesar Rp.348.900,00 yang terealisasi sebesar Rp.0,00 atau 0%, Kegiatan ini terdiri dari 1 Sub Kegiatan dengan rincian Sub Kegiatan sebagai berikut :

1.) Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk, Pelaksanaan kegiatan ini berlokasi di Kecamatan Kotaagung Timur dengan pencapaian kinerja sampai dengan triwulan ke II tahun 2024 yaitu 12 Laporan dengan pencapaian kinerja sebesar 6 Laporan dengan anggaran sebesar Rp.348.900,00 yang terealisasi sebesar Rp.0,00 atau 0%

- 3) Program Pencatatan Sipil, Pelaksanaan kegiatan ini berlokasi di Kecamatan Kotaagung Timur dengan pencapaian kinerja sampai dengan triwulan ke II tahun 2024 yaitu 100% dengan pencapaian kinerja sebesar 47,94% dengan anggaran sebesar Rp. 1.011.500,00 yang terealisasi sebesar Rp. 0 atau 0% dengan rincian 1 Kegiatan dan 1 Sub Kegiatan sebagai berikut :
- a) Kegiatan Pelayanan Pencatatan Sipil, Pelaksanaan kegiatan ini berlokasi di Kecamatan Kotaagung Timur dengan pencapaian kinerja sampai dengan triwulan ke II tahun 2024 yaitu 100% dengan pencapaian kinerja sebesar 47,94% dengan anggaran sebesar Rp. 1.011.500,00 yang terealisasi sebesar Rp.0 atau 0%, Kegiatan ini terdiri dari 1 Sub Kegiatan dengan rincian Sub Kegiatan sebagai berikut :
- 1.) Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas Pelaporan Peristiwa Penting, Pelaksanaan kegiatan ini berlokasi di Kecamatan Kotaagung Timur dengan pencapaian kinerja sampai dengan triwulan ke II tahun 2024 yaitu 4.950 Dokumen dengan pencapaian kinerja sebesar 2.373 Dokumen dengan anggaran sebesar Rp. 1.011.500,00 yang terealisasi sebesar Rp.0 atau 0%
- 4) Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan, Pelaksanaan kegiatan ini berlokasi di Kecamatan Kotaagung Timur dengan pencapaian kinerja sampai dengan triwulan ke II tahun 2024 yaitu 100%

dengan pencapaian kinerja sebesar 0% dengan anggaran sebesar Rp.1.604.300,00 yang terealisasi sebesar Rp.0 atau 0% dengan rincian dengan 1 Kegiatan dan 1 Sub Kegiatan sebagai berikut :

a.) Kegiatan Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan Penyajian Database Kependudukan, Pelaksanaan kegiatan ini berlokasi di Kecamatan Kotaagung Timur dengan pencapaian kinerja sampai dengan triwulan ke II tahun 2024 yaitu 100% dengan pencapaian kinerja sebesar 0% dengan anggaran sebesar Rp.1.604.300,00 yang terealisasi sebesar Rp.0 atau 0%, Kegiatan ini terdiri dari 1 Sub Kegiatan dengan rincian Sub Kegiatan sebagai berikut :

1.) Kerjasama Pemanfaatan Data kependudukan, Pelaksanaan kegiatan ini berlokasi di Kecamatan Kotaagung Timur dengan pencapaian kinerja sampai dengan triwulan ke II tahun 2024 yaitu 15 Dokumen dengan pencapaian kinerja sebesar 0 Dokumen dengan anggaran sebesar Rp. 1.604.300,00 yang terealisasi sebesar Rp.0,00 atau 0%

5) Program Pengelolaan profil Kependudukan, Pelaksanaan kegiatan ini berlokasi di Kecamatan Kotaagung Timur dengan pencapaian kinerja sampai dengan triwulan ke II tahun 2024 yaitu 100% dengan pencapaian kinerja sebesar 50% dengan anggaran sebesar Rp.1.320.000,00

yang terealisasi sebesar Rp.0,00 atau 0% dengan rincian 1 Kegiatan dan 1 Sub Kegiatan sebagai berikut :

a) Kegiatan Penyusunan Profil Kependudukan, Pelaksanaan kegiatan ini berlokasi di Kecamatan Kotaagung Timur dengan pencapaian kinerja sampai dengan triwulan ke II tahun 2024 yaitu 100% dengan pencapaian kinerja sebesar 50% dengan anggaran sebesar Rp.1.320.000,00 yang terealisasi sebesar Rp.0 atau 0%, Kegiatan ini terdiri dari 1 Sub Kegiatan dengan rincian Sub Kegiatan sebagai berikut :

1.) Penyediaan Data Kependudukan Kabupaten/Kota, Pelaksanaan kegiatan ini berlokasi di Kecamatan Kotaagung Timur dengan pencapaian kinerja sampai dengan triwulan ke II tahun 2024 yaitu 2 Dokumen dengan pencapaian kinerja sebesar 1 Dokumen dengan anggaran sebesar Rp.1.320.000,00 yang terealisasi sebesar Rp.0,00 atau 0%

Rekapitulasi evaluasi hasil pelaksanaan Renja Perubahan dan pencapaian Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanggamus Tahun 2024 dapat diuraikan pada tabel 1 sebagai berikut :

Tabel 1. EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RENJA PD TAHUN 2024 SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2024 KABUPATEN TANGGAMUS

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Capaian Kinerja Program Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra PD)		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2023		Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan s.d Triwulan II Tahun 2024						Capaian Target Renstra PD s.d Triwulan II Tahun 2024					
							Target Renja PD Tahun 2024	Realisasi Renja PD Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)	Realisasi Target	Realisasi Tingkat Capaian Target (%)							
(1)	-2	(3)	(4)		(5)		(6)		(7)		(8) = (7 / 6)	(9) = (5+7)		(10) = (9 / 4)				
2	#		100	%	0	%	100	%	43,08	%	43,08	%	43,08	%	43,08	%		
2	#	01	100	%	0	%	100	%	67,48	%	67,48	%	67,48	%	67,48	%		
2	#	01	2.01		100	%	0	%	100	%	64,29	%	64,29	%	64,29	%		
2	12	01	2.01	01	12	Dokumen	0	Dokumen	3	Dokumen	3	Dokumen	100,00	%	3	Dokumen	25,00	%
2	12	01	2.01	02	3	Dokumen	0	Dokumen	1	Dokumen	1	Dokumen	100	%	1	Dokumen	33,33	%

2	12	01	2.01	03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	3	Dokumen	0	Dokumen	1	Dokumen	-	Dokumen	0	%	0	Dokumen	0,00	%
2	12	01	2.01	04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	3	Dokumen	0	Dokumen	1	Dokumen	1	Dokumen	100	%	1	Dokumen	33,33	%
2	12	01	2.01	05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	3	Dokumen	0	Dokumen	1	Dokumen	-	Dokumen	0	%	0	Dokumen	0,00	%
2	12	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	18	Laporan	0	Laporan	6	Laporan	3	Laporan	50	%	3	Laporan	16,67	%
2	12	01	2.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	9	Laporan	0	Laporan	3	Laporan	3	Laporan	100	%	3	Laporan	33,33	%
2	#	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Laporan Keuangan yang Disusun Tepat Waktu Keuangan	100	%	0	%	100	%	66,67	%	66,67	%	66,67	%	66,67	%
2	12	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	144	Orang/Bulan	0	Orang/Bulan	34	Orang/Bulan	34	Orang/Bulan	100	%	34	Orang/Bulan	23,61	%
2	12	01	2.02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	36	Dokumen	0	Dokumen	12	Dokumen	6	Dokumen	50	%	6	Dokumen	16,67	%
2	12	01	2.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	36	Dokumen	0	Dokumen	12	Dokumen	6	Dokumen	50	%	6	Dokumen	16,67	%

2	#	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Laporan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah yang Disusun dengan Baik	100	%	0	%	0	%	0	%	0,00	%	0,00	%	0,00	%
2	12	01	2.05	02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	1	Paket	0	Paket	0	Paket	0	Paket	0	%	0	Paket	0,00	%
2	#	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Laporan Administrasi Umum Perangkat Daerah yang Disusun dengan Baik	100	%	0	%	100	%	95,50	%	95,50	%	95,50	%	95,50	%
2	12	01	2.06	02	Penyediaan Peralatandan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	3	Paket	0	Paket	0	Paket	0	Paket	0	%	0	Paket	0,00	%
2	12	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	7	Paket	0	Paket	1	Paket	1	Paket	100	%	1	Paket	14,29	%
2	12	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakandan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakandan Penggandaan yang Disediakan	3	Paket	0	Paket	1	Paket	1	Paket	100	%	1	Paket	33,33	%
2	12	01	2.06	07	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	5	Paket	0	Paket	2	Paket	1	Paket	50	%	1	Paket	20,00	%
2	12	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	196	Laporan	0	Laporan	25	Laporan	33	Laporan	132	%	33	Laporan	16,84	%
2	#	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Laporan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang Disusun dengan Baik	100	%	0	%	100	%	50,00	%	50	%	50	%	50,00	%
2	12	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	36	Laporan	0	Laporan	12	Laporan	6	Laporan	50	%	6	Laporan	16,67	%

2	12	01	2.08	03	Penyediaan JasaPeralatan danPerlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	27	Laporan	0	Laporan	12	Laporan	6	Laporan	50	%	6	Laporan	22,22	%
2	12	01	2.08	04	Penyediaan JasaPelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	36	Laporan	0	Laporan	12	Laporan	6	Laporan	50	%	6	Laporan	16,67	%
2	#	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang Disusun dengan Baik	100	%	0	%	100	%	60,94	%	60,94	%	60,94	%	60,94	%
2	12	01	2.09	01	Penyediaan JasaPemeliharaan, BiayaPemeliharaan dan PajakKendaraan PeroranganDinas atau KendaraanDinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	3	Unit	0	Unit	1	Unit	1	Unit	100	%	1	Unit	33,33	%
2	12	01	2.09	02	Penyediaan JasaPemeliharaan, BiayaPemeliharaan, Pajak, danPerizinan KendaraanDinas Operasional atauLapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	15	Unit	0	Unit	5	Unit	5	Unit	100	%	5	Unit	33,33	%
2	12	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatandan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	103	Unit	0	Unit	48	Unit	21	Unit	43,75	%	21	Unit	20,39	%
2	12	01	2.09	09	Pemeliharaan/RehabilitasiGedung Kantor danBangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	3	Unit	0	Unit	1	Unit	0	Unit	0	%	0	Unit	0,00	%

2	#	02			PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	Persentase Penduduk yang memiliki KTP-el	100	%	0	%	100	%	50,00	%	50	%	50,00	%		
2	#	02	2.01		Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Persentase Keluarga yang memiliki Kartu keluarga	100	%	0	%	100	%	50,00	%	50	%	50,00	%		
2	12	02	2.01	04	Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Jumlah Laporan Hasil Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk	20	Laporan	0	Laporan	12	Laporan	6	Laporan	50	%	6	Laporan	30,00	%
2	#	03			PROGRAM PENCATATAN SIPIL	Persentase Penerbitan Akta Kelahiran	100	%	0	%	100	%	47,94	%	47,94	%	47,94	%	47,94	%
2	#	03	2.01		Pelayanan Pencatatan Sipil	Persentase Penerbitan Akta Kelahiran Usia 0 - 18 Tahun	100	%	0	%	100	%	47,94	%	47,94	%	47,94	%	47,94	%
2	12	03	2.01	01	Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas Laporan Peristiwa Penting	Jumlah Dokumen Hasil Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Laporan Peristiwa Penting	13.514	Dokumen	0	Dokumen	4.950	Dokumen	2.373	Dokumen	47,94	%	2373	Dokumen	17,56	%
2	#	04			PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	Persentase OPD yang Melakukan PKS	100	%	0	%	100	%	-	%	0,00	%	0	%	0,00	%
2	#	04	2.01		Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan	Persentase OPD yang mengajukan PKS	100	%	0	%	100	%	-	%	0,00	%	0	%	0,00	%
2	12	04	2.01	01	Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan	Jumlah Dokumen Data Kependudukan yang Diolah dan Disajikan	2	Dokumen	0	Dokumen	0	Dokumen	0	Dokumen	0	%	0,00	Dokumen	0,00	%
2	12	04	2.01	02	Kerjasama Pemanfaatan Data Kependudukan	Jumlah Dokumen Kerja Sama Pemanfaatan Data Kependudukan	96	Dokumen	0	Dokumen	15	Dokumen	-	Dokumen	0,00	%	0	Dokumen	0,00	%

2	#	05			PROGRAM PENGOLAHAN PROFIL KEPENDUDUKAN	Persentase profil Kependudukan Berdasarkan Jenis Kelamin	100	%	0	%	100	%	50,00	%	50,00	%	50,00	%	50,00	%
2	#	05	2.01		Penyusunan Profil Kependudukan	Persentase Penerbitan Buku Profil Kependudukan	100	%	0	%	100	%	50,00	%	50,00	%	50,00	%	50,00	%
2	12	05	2.01	01	Penyediaan data kependudukan kabupaten/kota	Jumlah Data Kependudukan Kabupaten/Kota	12	Dokumen	0	Dokumen	2	Dokumen	1	Dokumen	50	%	1	Dokumen	8,33	%

2.3. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Memperhatikan aturan yang ada betapa besar dan kompleksnya tugas dan fungsi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang harus dijalankan, disamping harus memfasilitasi tugas dari SKPD – SKPD yang lain juga harus memfasilitasi pelaksanaan tugas dan fungsi Desa. Namun, hal ini belum didukung dengan sarana dan prasarana, sumberdaya yang memadai dan anggaran yang dikelola, sehingga disadari pelaksanaan tugas dan kinerja selama ini bisa optimal.

Sebagai gambaran pencapaian kinerja pelayanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang cukup menonjol adalah pelayanan penerbitan Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan penerbitan dokumen Akta Kelahiran sesuai standar SPM penerbitan KTP Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dalam kurun waktu 5 tahun selalu memenuhi target SPM sebesar 100%. Hal ini didasari oleh memadainya SDM/aparat yang melayani di Bidang tersebut. Namun sampai saat ini laporan perkembangan kependudukan dari tingkat pekon masih banyak yang belum melaporkan dan walaupun melaporkan belum secara continue. Ketertiban masyarakat masih perlu peningkatkan kinerja aparat maupun bimbingan serta dukungan dari masyarakat misalnya pada cakupan pembuatan KTP dan Akta Kelahiran. Kesadaran masyarakat masih sangat minim, hal tersebut dikarenakan masih kurangnya kesadaran masyarakat untuk memiliki dokumen kependudukan dan catatan sipil. Masyarakat masih belum menyadari sepenuhnya terhadap pentingnya memiliki dokumen kependudukan baik berupa Kartu Keluarga (KK), Kartu Tanda Penduduk (KTP), dan Akta-akta Pencatatan Sipil .hal ini disebabkan masih belum terlaksananya dengan baik pembinaan

dan pengembangan sumberdaya manusia dalam pengelola Kependudukan dan Pencatatan Sipil berupa Bimtek ataupun Diklat dan Penyuluhan maupun sejenisnya.

Pencapaian kinerja pelayanan Perangkat Daerah Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanggamus dapat dilihat dalam Tabel 2, dibawah ini :

Tabel 2. PENCAPAIAN KINERJA PELAYANAN PD DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN TANGGAMUS

NO	Indikator	Target SPM/ NSPK	Target IKK	Target Renstra PD				Realisasi Capaian		Catatan Analisis
				Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2023	Tahun 2024	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	SPM									
A	Penerbitan Kartu Tanda Penduduk									
1	Penerbitan Kartu Tanda Penduduk									
a	Penerbitan Kartu Tanda Penduduk (KTP-el)	99,40 %		42.358	46.879	50.125	52.890	45.379	47.978	
B	Penerbitan Kartu Keluarga									
1	Penerbitan Kartu Keluarga									
a	Penerbitan Kartu Keluarga (KK)	100 %		49.145	42.412	50.420	52.145	50.092	43.543	
C	Penerbitan Akta Kelahiran									
1	Penerbitan Akta Kelahiran									
a	Penerbitan Akta Kelahiran	99 %		28.248	17.250	30.165	35.140	29.389	19.116	

2.4. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yaitu sebagai berikut :

1. Terindikasi masih ada penduduk Kabupaten Tanggamus yang belum terdaftar dalam database kependudukan;
2. Adanya tidak kesesuaian data/identitas antara database kependudukan dengan dokumen lain seperti ijazah, surat/akad nikah, serta berbagai intervensi pembangunan seperti Jamkesmas dan lain-lain;
3. Belum semua PD melakukan Perjanjian Kerjasama Pemanfaatan Database Kependudukan;
4. Masih rendahnya capaian Identitas Kependudukan Digital (IKD)

Beranjak dari permasalahan tersebut, maka pelayanan administrasi kependudukan untuk masa yang akan datang, terfokus pada peningkatan kualitas dan kuantitas pelayanan, terutama :

1. Peningkatan cakupan Identitas Kependudukan Digital;
2. Peningkatan dan pemantapan pembangunan sistem informasi administrasi kependudukan (SIAK);
3. Peningkatan sumber daya aparatur;
4. Peningkatan kualitas pelayanan penerbitan Administrasi Kependudukan;
5. Peningkatan pengetahuan dan kesadaran masyarakat tentang administrasi kependudukan.

Dengan demikian harapan yang diinginkan pada kondisi mendatang adanya upaya dalam penyiapan perumusan kebijakan di bidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil sehingga perkembangan kependudukan proyeksi dan penyerasian kebijakan kependudukan baik dalam hal perencanaan serta monitoring dan evaluasi kependudukan sesuai dengan ketentuan perundang – undangan yang berlaku.

BAB III
RENCANA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN DALAM
PERUBAHAN RENJA-PD

3.1 PRIORITAS PEMBANGUNAN TAHUN 2024

3.1.1 Prioritas Pembangunan Nasional

Arah kebijakan pembangunan nasional merupakan pedoman untuk merumuskan prioritas dan sasaran pembangunan daerah serta rencana program, kegiatan, sub kegiatan pembangunan daerah yang dilakukan melalui pendekatan politik, teknokratik, partisipatif, *bottom up* dan *top down*. Keberhasilan pembangunan nasional adalah keberhasilan dari pencapaian semua sasaran dan prioritas serta program, kegiatan, sub kegiatan pembangunan daerah yang ditetapkan dalam RKPD dan dilaksanakan secara nyata oleh semua pemangku kepentingan.

Sesuai dengan Tema RKP Tahun 2024 **”Mempercepat Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan”**, pembangunan nasional diarahkan pada 8 (delapan) arah kebijakan yang meliputi:

1. Pengurangan Kemiskinan dan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem;
2. Peningkatan Kualitas Pelayanan Kesehatan dan Pendidikan;
3. Revitalisasi Industri dan Penguatan Riset Terapan;
4. Penguatan Daya Saing Usaha;
5. Pembangunan Rendah Karbon dan Transisi Energi;
6. Percepatan Pembangunan Infrastruktur Dasar dan Konektivitas;
7. Pembangunan Ibu Kota Nusantara;
8. Pelaksanaan Pemilu 2024.

Secara rinci 8 (delapan) arah kebijakan tersebut dijabarkan sebagai berikut:

1. Arah kebijakan Pengurangan Kemiskinan dan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem, yang ditandai dengan pencapaian:
 - a. Tingkat Kemiskinan: 6,5-7,5%;
 - b. Tingkat kemiskinan ekstrem: 0-1%.Dukungan terhadap *Major Project* (MP), antara lain:
 - MP Reformasi Sistem Perlindungan Sosial.

2. Arah kebijakan Peningkatan Kualitas Pelayanan Kesehatan dan Pendidikan, yang ditandai dengan pencapaian:
 - a. Prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek) pada balita: 14%;
 - b. Insidensi tuberkulosis: 190 per 100.000 penduduk;
 - c. Jumlah kabupaten/kota yang mencapai eliminasi malaria: 405 kab/kota;
 - d. Jumlah kabupaten/kota dengan eliminasi kusta: 514 kab/kota;
 - e. Nilai rata-rata hasil PISA: (a) Membaca: 396 b) Matematika: 388 (c) Sains 402.

Dukungan terhadap *Major Project* (MP), antara lain:

- MP Reformasi Sistem Kesehatan Nasional;
 - MP Refomasi Pendidikan Keterampilan (Pendidikan dan Pelatihan Vokasi untuk Industri 4.0);
 - MP Percepatan Penurunan Kematian Ibu dan Stunting.
3. Arah Kebijakan Revitalisasi Industri dan Penguatan Riset Terapan, yang ditandai dengan pencapaian:
 - a. Pertumbuhan PDB industri pengolahan: 5,4%- 5,8% per target RPJMN 8,1%;
 - b. Kontribusi PDB industri pengolahan: 19,5%- 20,6% per Target RPJMN 21,0%.

Dukungan terhadap *Major Project* (MP), antara lain:

- MP Kawasan Industri Prioritas dan Smelter;
 - MP Pengelolaan Terpadu UMKM;
 - MP 10 Destinasi Pariwisata Prioritas;
 - MP *Food Estate* (Kawasan Sentra Produksi Pangan);
 - Transformasi Digital.
4. Arah kebijakan Penguatan Daya Saing Usaha, yang ditandai dengan pencapaian:
 - a. Pertumbuhan Investasi (PMTB): 6,2%-7%;
 - b. Nilai devisa pariwisata: USD 7,38–13,0 miliar.

Dukungan terhadap *Major Project* (MP), antara lain:

- MP Pengelolaan Terpadu UMKM;

5. Arah kebijakan Pembangunan Rendah Karbon dan Transisi Energi, yang ditandai dengan pencapaian:
 - a. Persentase Penurunan emisi GRK kumulatif: 27,27%;
 - b. Porsi EBT dalam Bauran Energi Primer Nasional: 17%
 Dukungan terhadap *Major Project* (MP), antara lain:
 - MP Pembangunan Fasilitas Pengolahan Limbah B3;
 - MP Akselerasi Pengembangan Energi Terbarukan dan Konservasi Energi.
6. Arah kebijakan Percepatan Pembangunan Infrastruktur Dasar dan Konektivitas, yang ditandai dengan pencapaian:
 - a. Persentase kondisi mantap jalan nasional/provinsi/ kabupaten-kota: 95%/75%/65%;
 - b. Rumah tangga yang menempati hunian dengan akses air minum layak dan aman: 92,76% akses layak dan 15% akses aman;
 - c. Rumah tangga dengan akses air minum jaringan perpipaan: 25,53%;
 - d. Rumah Tangga yang menempati hunian dengan akses sanitasi (air limbah domestik) layak dan aman: 86% akses layak termasuk 12 % akses aman;
 - e. Jumlah Bandara Baru yang Dibangun (kumulatif): 11 lokasi;
 - f. Rata-rata pemenuhan kebutuhan (konsumsi) listrik: 1.300 kwh/kapita.
7. Arah kebijakan Pembangunan Ibu Kota Nusantara, yang ditandai dengan pencapaian:

Luas area pembangunan Ibu Kota Nusantara: 3.399 Ha dalam 6.671 Ha KIPP, meliputi:

 - a. Persentase Pembangunan di Kawasan Istana Presiden: 100%;
 - b. Persentase Pembangunan Kantor Kementerian Koordinator: 100%;
 - c. Persentase Pembangunan Hunian ASN dan HANKAM: 100%.
 Dukungan terhadap *Major Project* (MP), antara lain:
 - MP Ibu Kota Nusantara;
 - MP Wilayah Adat Papua: Wilayah Adat Laa Pago dan Wilayah Adat Domberay.

8. Arah kebijakan Pelaksanaan Pemilu 2024, yang ditandai dengan pencapaian:

- a. Jumlah Satker KPU/KPU Provinsi/KPU Kabupaten/KPU Kota yang menyelenggarakan Pemilu/pemilihan sesuai dengan jadwal: 553 satker.

Dukungan terhadap *Major Project* (MP), antara lain:

- Didukung oleh proyek-proyek prioritas.

Gambar III.1. Arah Kebijakan Pembangunan Tahun 2024



Sumber : Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas, 2023

Selanjutnya Arah Kebijakan Pembangunan dilaksanakan untuk mencapai Sasaran Pembangunan RKP Tahun 2024, yang meliputi:

1. Pertumbuhan Ekonomi sebesar 5,3% - 5,7%;
2. Tingkat Kemiskinan sebesar 6,5% - 7,5%;
3. Tingkat Pengangguran Terbuka sebesar 5,0 - 5,7%;
4. Rasio Gini (nilai) sebesar 0,374-0,377;
5. Indeks Pembangunan Manusia/IPM (nilai) sebesar 73,99 - 74,02;
6. Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca/GRK sebesar 27,27%.

Serta indikator lainnya yaitu:

1. Nilai Tukar Nelayan/NTN (nilai) sebesar 107 - 110;
2. Nilai Tukar Petani/NTP (nilai) sebesar 105 - 108.

Gambar III.2 Indikator Sasaran Pembangunan Nasional Tahun 2024



Sumber : Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas, 2023
 Sasaran dan prioritas penyusunan RKPD Tahun 2024 agar diselaraskan untuk mendukung pencapaian pencapaian Visi dan Misi Presiden dan Wakil Presiden melalui 5 (lima) arahan utama Presiden, sebagai berikut:

1. Pembangunan sumber daya manusia (SDM), membangun SDMpekerja keras yang dinamis, produktif, terampil, menguasai ilmupengetahuan dan teknologi didukung dengan kerjasama industri dantalanta global;
2. Pembangunan Infrastruktur, melanjutkan pembangunaninfrastruktur untuk menghubungkan kawasan produksi dengankawasan distribusi, mempermudah akses ke kawasan wisata,mendongkrak lapangan kerja baru, dan mempercepat peningkatannilai tambah perekonomian rakyat;
3. Penyederhanaan Regulasi, menyederhanakan segala bentuk regulasidengan pendekatan Omnibus Law, terutama menerbitkan UndangUndang Cipta Kerja;
4. Penyederhanaan Birokrasi, memprioritaskan investasi untukpenciptaan lapangan kerja, memangkas prosedur dan birokrasi yangpanjang, dan menyederhanakan eselonisasi; dan
5. Transformasi Ekonomi, melakukan transformasi ekonomi dari ketergantungan sumber daya alam menjadi daya saing manufaktur dan jasa modern yang mempunyai nilai tambah tinggi bagikemakmuran bangsa demi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Untuk mewujudkan pelaksanaan 5 (lima) arahan Presiden tersebut, didefinisikan ke dalam 7 (tujuh) Agenda Pembangunan yang perlu diperkuat, sebagai berikut:

1. Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan.

Peningkatan inovasi dan kualitas Investasi merupakan modal utama untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi, berkelanjutan dan mensejahterakan secara adil dan merata. pembangunan ekonomi akan dipacu untuk tumbuh lebih tinggi, inklusif dan berdaya saing melalui:

- a. Pengelolaan sumber daya ekonomi yang mencakup pemenuhan pangan dan pertanian serta pengelolaan kemaritiman, kelautan dan perikanan, sumber daya air, sumber daya energi, serta kehutanan; dan
- b. Akselerasi peningkatan nilai tambah agrofisery industri, kemaritiman, energi, industri, pariwisata, serta ekonomi kreatif dan digital.

Agenda pembangunan ini diturunkan ke dalam Program Prioritas dan Kegiatan Prioritas sebagai berikut:

- a. Pemenuhan kebutuhan energi dengan mengutamakan peningkatan Energi Baru Terbarukan (EBT), dengan kegiatan prioritas, yaitu:
 - 1) Akselerasi pengembangan pembangkit energi terbarukan;
 - 2) Peningkatan pasokan bahan bakar nabati;
 - 3) Peningkatan pelaksanaan konservasi dan efisiensi energi;
 - 4) Peningkatan pemenuhan energi domestik; dan
 - 5) Pengembangan industri pendukung Energi Baru Terbarukan (EBT).
- b. Peningkatan kuantitas/ketahanan air untuk mendukung pertumbuhan ekonomi, dengan kegiatan prioritas, yaitu:
 - 1) Pemantapan Kawasan berfungsi Lindung (kumulatif);
 - 2) Pengelolaan hutan berkelanjutan;
 - 3) Penyediaan air untuk pertanian;
 - 4) Penyediaan air baku untuk kawasan prioritas;

- 5) Pemeliharaan, pemulihan, dan konservasi sumber daya air dan ekosistemnya termasuk revitalisasi danau dan infrastruktur hijau; dan
 - 6) Pengembangan waduk multiguna.
- c. Peningkatan ketersediaan, akses dan kualitas konsumsi pangan, dengan kegiatan prioritas, yaitu:
- 1) Peningkatan kualitas konsumsi, keamanan, fortifikasi dan biofortifikasi pangan;
 - 2) Peningkatan ketersediaan pangan hasil pertanian, perikanan dan pangan hasil laut secara berkelanjutan;
 - 3) Peningkatan produktivitas, kesejahteraan sumber daya manusia (sdm) pertanian, perikanan dan kepastian pasar;
 - 4) Peningkatan keberlanjutan produktivitas sumber daya pertanian, dan digitalisasi pertanian; dan
 - 5) Peningkatan tata kelola sistem pangan nasional.
- d. Peningkatan pengelolaan kemaritiman, perikanan dan kelautan, dengan kegiatan prioritas, yaitu:
- 1) peningkatan pengelolaan Wilayah Pengelolaan Perikanan (WPP) dan penataan ruang laut dan rencana zonasi pesisir serta pengelolaan ruang laut;
 - 2) peningkatan ekosistem kelautan dan pemanfaatan jasa kelautan;
 - 3) peningkatan produksi, produktivitas, standardisasi mutu, dan nilai tambah produk kelautan dan perikanan;
 - 4) peningkatan fasilitasi usaha, pembiayaan, dan akses perlindungan usaha kelautan dan perikanan skala kecil serta akses terhadap pengelolaan sumber daya; dan
 - 5) peningkatan sumber daya manusia (SDM) dan riset kemaritiman dan kelautan serta database kelautan dan perikanan.
- e. Penguatan kewirausahaan, Usaha Mikro, Kecil Menengah (UMKM), dan koperasi, dengan kegiatan prioritas, yaitu:
- 1) Peningkatan kemitraan usaha antara Usaha Mikro Kecil dan Usaha Menengah Besar;

- 2) Peningkatan kapasitas usaha dan akses pembiayaan bagi wirausaha;
 - 3) Peningkatan kapasitas, jangkauan, dan inovasi koperasi; dan
 - 4) Peningkatan penciptaan start-up dan peluang usaha.
- f. Peningkatan nilai tambah, lapangan kerja, dan investasi di sektor riil, dan industrialisasi, dengan kegiatan prioritas, yaitu:
- 1) Peningkatan industri pengolahan berbasis pertanian, kemaritiman, dan non agro yang terintegrasi hulu-hilir;
 - 2) Peningkatan industrialisasi berbasis hilirisasi sumber daya alam, termasuk melalui pengembangan smelter dan kawasan industri terutama di luar Jawa;
 - 3) Peningkatan daya saing destinasi dan industri pengolahan pariwisata, termasuk wisata alam, yang didukung penguatan rantai pasok;
 - 4) Peningkatan nilai tambah dan daya saing produk dan usaha kreatif dan digital;
 - 5) Perbaikan iklim usaha dan peningkatan investasi, termasuk reformasi ketenagakerjaan; dan
 - 6) Pengembangan industri halal.
- g. Peningkatan ekspor bernilai tambah tinggi dan penguatan Tingkat Kandungan Dalam Negeri (TKDN), dengan kegiatan prioritas, yaitu:
- 1) Peningkatan diversifikasi, nilai tambah, dan daya saing produk ekspor dan jasa;
 - 2) Peningkatan akses dan pendalaman pasar ekspor;
 - 3) Pengelolaan impor;
 - 4) Peningkatan kandungan dan penggunaan produk dalam negeri termasuk melalui pengadaan pemerintah yang efektif;
 - 5) Peningkatan partisipasi dalam jaringan produksi global;
 - 6) Peningkatan citra dan diversifikasi pemasaran destinasi pariwisata prioritas dan destinasi branding, dan produk kreatif; dan
 - 7) Peningkatan efektivitas preferential trade agreement (PTA)/free trade Agreement (FTA)/Comprehensive Economic Partnership Agreement (CEPA) dan diplomasi ekonomi.

- h. Penguatan pilar pertumbuhan dan daya saing ekonomi, dengan kegiatan prioritas, yaitu:
 - 1) Peningkatan pendalaman sektor keuangan;
 - 2) Optimalisasi pemanfaatan teknologi digital dan industry 4.0;
 - 3) Peningkatan sistem logistik dan stabilitas harga;
 - 4) Peningkatan penerapan praktik berkelanjutan di industri pengolahan dan pariwisata; dan
 - 5) Peningkatan ketersediaan dan kualitas data dan informasi perkembangan ekonomi, terutama pangan, kemaritiman, pariwisata, ekonomi kreatif, dan ekonomi digital.
2. Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan;

Pengembangan wilayah ditujukan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan pemenuhan pelayanan dasar dengan memperhatikan harmonisasi antara rencana pembangunan dengan pemanfaatan ruang. Pengembangan wilayah yang mampu menciptakan kesinambungan dan keberlanjutan ini dapat dilakukan melalui:

 - a. Pengembangan sektor/ komoditas/kegiatan unggulan daerah;
 - b. Distribusi pusat-pusat pertumbuhan (pkw) ke wilayah belum berkembang;
 - c. Peningkatan daya saing wilayah yang inklusif;
 - d. Memperkuat kemampuan sumber daya manusia (sdm) dan ilmu pengetahuan dan teknologi (iptek) berbasis kewilayahan dalam mendukung ekonomi unggulan daerah; serta
 - e. Meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) melalui pemenuhan pelayanan dasar secara merata
3. Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing;

Manusia merupakan modal utama pembangunan nasional untuk menuju pembangunan yang inklusif dan merata di seluruh wilayah. Pemerintah Indonesia berkomitmen untuk meningkatkan kualitas dan daya saing sumber daya manusia (SDM) yaitu sumber daya manusia (SDM) yang sehat dan cerdas, adaptif, inovatif, terampil, dan berkarakter, melalui:

 - a. Pengendalian penduduk dan penguatan tata kelola kependudukan;

- b. Penguatan pelaksanaan perlindungan sosial;
- c. Peningkatan akses dan kualitas pelayanan kesehatan menuju cakupan kesehatan semesta;
- d. Peningkatan pemerataan layanan pendidikan berkualitas;
- e. Peningkatan kualitas anak, perempuan, dan pemuda;
- f. Pengentasan kemiskinan; dan
- g. Peningkatan produktivitas dan daya saing.

Agenda pembangunan ini diturunkan ke dalam program prioritas dan kegiatan prioritas sebagai berikut:

- a. Pengendalian penduduk dan penguatan tata kelola kependudukan, yaitu:
 - 1) Percepatan cakupan administrasi kependudukan;
 - 2) Integrasi sistem administrasi kependudukan;
 - 3) Pendampingan dan layanan terpadu; dan
 - 4) Pemaduan dan sinkronisasi kebijakan pengendalian penduduk.
- b. Penguatan pelaksanaan perlindungan sosial, dengan kegiatan prioritas, yaitu:
 - 1) Sistem jaminan sosial nasional;
 - 2) Bantuan sosial dan subsidi tepat sasaran; dan
 - 3) Kesejahteraan sosial.
- c. Peningkatan akses dan mutu pelayanan kesehatan, dengan kegiatan prioritas, yaitu:
 - 1) Peningkatan kesehatan ibu, anak, keluarga berencana (KB), dan kesehatan reproduksi;
 - 2) Percepatan perbaikan gizi masyarakat;
 - 3) Peningkatan pengendalian penyakit
 - 4) Penguatan gerakan masyarakat (Germas) hidup sehat; dan
 - 5) Penguatan sistem kesehatan dan pengawasan obat dan makanan, mencakup:
 - Penguatan pelayanan kesehatan dasar dan rujukan,
 - Pemenuhan dan peningkatan kompetensi tenaga Kesehatan,
 - Pemenuhan dan peningkatan daya saing sediaan farmasi dan alat Kesehatan,

- Peningkatan efektivitas pengawasan obat dan makanan, dan
 - Penguatan tata kelola, pembiayaan, penelitian dan pengembangan Kesehatan.
- d. Peningkatan pemerataan layanan pendidikan berkualitas, dengan kegiatan prioritas, yaitu:
- 1) Peningkatan kualitas pengajaran dan pembelajaran;
 - 2) Pemerataan akses dan wajib belajar 12 tahun;
 - 3) Peningkatan pengelolaan dan penempatan pendidik dan tenaga kependidikan;
 - 4) Penjaminan mutu pendidikan; dan
 - 5) Peningkatan tata kelola pendidikan.
- e. Peningkatan kualitas anak, perempuan dan pemuda, dengan kegiatan prioritas, yaitu:
- 1) Pemenuhan hak dan perlindungan anak;
 - 2) Peningkatan kesetaraan gender, pemberdayaan dan perlindungan perempuan; dan
 - 3) Kualitas pemuda.
- f. Pengentasan kemiskinan, dengan kegiatan prioritas, yaitu:
- 1) Akselerasi penguatan ekonomi keluarga;
 - 2) Keperantaraan usaha dan dampak sosial;
 - 3) Reforma agraria; dan
 - 4) Perhutanan sosial.
- g. Peningkatan produktivitas dan daya saing, dengan kegiatan prioritas, yaitu:
- 1) Pendidikan dan pelatihan vokasi berbasis kerjasama industri;
 - 2) Penguatan pendidikan tinggi berkualitas;
 - 3) Peningkatan kapabilitas ilmu pengetahuan dan teknologi (iptek) dan penciptaan inovasi; dan
 - 4) Prestasi olahraga.
4. Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan;
- Revolusi mental sebagai gerakan kebudayaan memiliki kedudukan penting dan berperan sentral dalam pembangunan untuk mengubah

cara pandang, sikap, perilaku yang berorientasi pada kemajuan dan kemodernan. Revolusi mental dilaksanakan secara terpadu yang bertumpu pada:

- a. Revolusi mental dalam sistem pendidikan;
- b. Revolusi mental dalam tata kelola pemerintahan; dan
- c. Revolusi mental dalam sistem sosial. Selain itu revolusi mental juga diperkuat melalui upaya pemajuan dan pelestarian kebudayaan, memperkuat moderasi beragama; dan meningkatkan budaya literasi, inovasi, dan kreativitas.

Agenda pembangunan ini diturunkan ke dalam program prioritas dan kegiatan prioritas sebagai berikut:

- a. Revolusi mental dan Pembinaan Ideologi Pancasila untuk memperkuat ketahanan budaya bangsa dan membentuk mentalitas bangsa yang maju, modern, dan berkarakter, dengan kegiatan prioritas, yaitu:
 - 1) Revolusi mental dalam sistem pendidikan untuk memperkuat nilai integritas, etos kerja, gotong royong, dan budi pekerti;
 - 2) Revolusi mental dalam tata kelola pemerintahan untuk penguatan budaya birokrasi yang bersih, melayani, dan responsif;
 - 3) Revolusi mental dalam sistem sosial untuk memperkuat ketahanan, kualitas dan peran keluarga dan masyarakat dalam pembentukan karakter;
 - 4) Penguatan pusat-pusat perubahan gerakan revolusi mental;
 - 5) Pembangunan dan pembudayaan sistem ekonomi kerakyatan berlandaskan pancasila; dan
 - 6) Pembinaan ideologi pancasila, pendidikan kewarganegaraan, wawasan kebangsaan dan bela negara untuk menumbuhkan jiwa nasionalisme dan patriotisme;
- b. Meningkatkan pemajuan Dan pelestarian kebudayaan untuk memperkuat karakter dan memperteguh jati diri bangsa, meningkatkan kesejahteraan rakyat, dan mempengaruhi arah perkembangan peradaban dunia, dengan kegiatan prioritas, yaitu:

- 1) Revitalisasi dan aktualisasi nilai budaya dan kearifan lokal;
 - 2) Pengembangan dan pemanfaatan kekayaan budaya untuk memperkuat karakter bangsa dan kesejahteraan rakyat;
 - 3) Pelindungan hak kebudayaan dan ekspresi budaya untuk memperkuat kebudayaan yang inklusif;
 - 4) Pengembangan diplomasi budaya untuk memperkuat pengaruh indonesia dalam perkembangan peradaban dunia; dan
 - 5) Pengembangan tata kelola pembangunan kebudayaan.
- c. Memperkuat moderasi beragama untuk mengukuhkan toleransi, kerukunan dan harmoni sosial, dengan kegiatan prioritas, yaitu:
- 1) Penguatan cara pandang, sikap, dan praktik beragama dalam perspektif jalan tengah untuk memantapkan persaudaraan dan kebersamaan di kalangan umat beragama;
 - 2) Penguatan harmoni dan kerukunan umat beragama;
 - 3) Penyelarasan relasi agama dan budaya;
 - 4) Peningkatan kualitas pelayanan kehidupan beragama; dan
 - 5) Pengembangan ekonomi dan sumber daya keagamaan.
- d. Peningkatan budaya literasi, inovasi dan kreativitas bagi terwujudnya masyarakat berpengetahuan, dan berkarakter, dengan kegiatan prioritas, yaitu:
- 1) Peningkatan budaya literasi;
 - 2) Pengembangan, pembinaan, dan pelindungan bahasa indonesia, bahasa dan aksara daerah, serta sastra;
 - 3) Pengembangan budaya ilmu pengetahuan dan teknologi (iptek), inovasi, kreativitas, dan daya cipta; dan
 - 4) Penguatan institusi sosial penggerak literasi dan inovasi.
5. Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar;
- Perkuatan infrastruktur ditujukan untuk mendukung aktivitas perekonomian serta mendorong pemerataan pembangunan nasional. Pemerintah Indonesia akan memastikan pembangunan infrastruktur akan didasarkan kebutuhan dan keunggulan wilayah melalui:
- a. Menjadikan keunggulan wilayah sebagai acuan untuk mengetahui kebutuhan infrastruktur wilayah;

- b. Peningkatan pengaturan, pembinaan dan pengawasan dalam pembangunan;
- c. Pengembangan infrastruktur perkotaan berbasis teknologi informasi dan komunikasi (tik);
- d. Rehabilitasi sarana dan prasarana yang sudah tidak efisien; dan
- e. Mempermudah perijinan pembangunan infrastruktur.

Agenda pembangunan ini diturunkan ke dalam program prioritas dan kegiatan prioritas sebagai berikut:

- a. Infrastruktur pelayanan dasar, dengan kegiatan prioritas, yaitu:
 - 1) Penyediaan akses perumahan dan permukiman layak, aman dan terjangkau;
 - 2) Penyediaan akses air minum dan sanitasi layak dan aman;
 - 3) Pengelolaan air tanah dan air baku berkelanjutan;
 - 4) Keselamatan dan keamanan transportasi;
 - 5) Ketahanan kebencanaan infrastruktur; dan
 - 6) Waduk multipurpose dan modernisasi irigasi.
- b. Infrastruktur ekonomi, dengan kegiatan prioritas, yaitu:
 - 1) Konektivitas jalan;
 - 2) Konektivitas kereta api;
 - 3) Konektivitas laut;
 - 4) Konektivitas udara; dan
 - 5) Konektivitas darat.
- c. Infrastruktur perkotaan, dengan kegiatan prioritas, yaitu:
 - 1) Transportasi perkotaan; dan
 - 2) Infrastruktur dan ekosistem teknologi informasi dan komunikasi (TIK) perkotaan.
- d. Energi dan ketenagalistrikan, dengan kegiatan prioritas, yaitu:
 - 1) Keberlanjutan penyediaan energi dan ketenagalistrikan;
 - 2) Akses dan keterjangkauan energi dan ketenagalistrikan; dan
 - 3) Kecukupan penyediaan energi dan tenaga listrik.
- e. Transformasi digital, dengan kegiatan prioritas, yaitu:
 - 1) Penuntasan infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi (TIK);

- 2) Pemanfaatan infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi (TIK); dan
 - 3) Fasilitas pendukung transformasi digital.
6. Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim;
- Membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana, dan perubahan iklim Pembangunan nasional perlu memperhatikan daya dukung sumber daya alam dan daya tampung lingkungan hidup, kerentanan bencana, dan perubahan iklim. Pembangunan lingkungan hidup, serta peningkatan ketahanan bencana dan perubahan iklim akan diarahkan melalui kebijakan:
- a. Peningkatan kualitas lingkungan hidup;
 - b. Peningkatan ketahanan bencana dan iklim; serta
 - c. Pembangunan rendah karbon
- Agenda pembangunan ini diturunkan ke dalam program prioritas dan kegiatan prioritas sebagai berikut:
- a. Peningkatan kualitas lingkungan hidup, dengan kegiatan prioritas, yaitu:
 - 1) Pencegahan pencemaran dan kerusakan sumber daya alam dan lingkungan hidup;
 - 2) Penanggulangan pencemaran dan kerusakan sumber daya alam dan lingkungan hidup;
 - 3) Pemulihan pencemaran dan kerusakan sumber daya alam dan lingkungan hidup; dan
 - 4) Penguatan kelembagaan dan penegakan hukum di bidang sumber daya alam dan lingkungan hidup.
 - b. Peningkatan ketahanan bencana dan iklim, dengan kegiatan prioritas, yaitu:
 - 1) Penanggulangan bencana; dan
 - 2) Peningkatan ketahanan iklim.
 - c. Pembangunan rendah karbon, dengan kegiatan prioritas, yaitu:
 - 1) Pembangunan energi berkelanjutan;
 - 2) Pemulihan lahan berkelanjutan; dan
 - 3) Pengembangan industri hijau

7. Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik.

Negara wajib terus hadir dalam melindungi segenap bangsa, memberikan rasa aman serta pelayanan publik yang berkualitas pada seluruh warga negara dan menegakkan kedaulatan negara. Pemerintah akan terus berupaya meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan transparan yang dapat diakses oleh semua masyarakat melalui:

- a. Reformasi kelembagaan birokrasi untuk pelayanan publik berkualitas;
- b. Meningkatkan hak hak politik dan kebebasan sipil;
- c. Memperbaiki sistem peradilan, penataan regulasi dan tata kelola keamanan siber;
- d. Mempermudah akses terhadap keadilan dan sistem anti korupsi; dan
- e. Mempermudah akses terhadap pelayanan dan perlindungan warga negara indonesia (WNI) di luar negeri.

Agenda pembangunan ini diturunkan ke dalam program prioritas dan kegiatan prioritas sebagai berikut:

- a. Konsolidasi demokrasi, dengan kegiatan prioritas, yaitu:
 - 1) Penguatan kapasitas lembaga demokrasi;
 - 2) Penguatan kesetaraan dan kebebasan; dan
 - 3) Peningkatan kualitas komunikasi publik.
- b. Optimalisasi Kebijakan Luar Negeri, dengan kegiatan prioritas, yaitu:
 - 1) Penguatan integritas Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Perlindungan Warga Negara Indonesia (WNI) di luar negeri; dan
 - 2) Penguatan kerjasama pembangunan internasional.
- c. Reformasi birokrasi dan tata kelola, dengan kegiatan prioritas, yaitu:
 - 1) Penguatan implementasi manajemen ASN;
 - 2) Transformasi pelayanan publik;
 - 3) Penataan kelembagaan dan proses bisnis; dan
 - 4) Reformasi sistem akuntabilitas kinerja.

- d. Menjaga stabilitas keamanan nasional, dengan kegiatan prioritas, yaitu:
- 1) Penguatan keamanan dalam negeri;
 - 2) Penguatan keamanan laut; dan
 - 3) Penguatan keamanan dan ketertiban masyarakat.

Identifikasi tentang telaahan terhadap kebijakan nasional dan provinsi disajikan dalam Tabel 3 sebagai berikut :

Tabel 3. IDENTIFIKASI KEBIJAKAN NASIONAL DAN PROVINSI PD DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN TANGGAMUS

No	Kebijakan Nasional/Provinsi	Sumber	Keterangan
A	Nasional		
1	Program Penataan Administrasi Kependudukan 1. Terwujudnya Pemberian NIK pada setiap penduduk 2. Terwujudnya Perencanaan dan Keserasian Kebijakan Kependudukan	Renstra Kementrian	
2	Terwujudnya Digitalisasi Administrasi kependudukan Untuk Pelayanan Publik	RAKORNAS Disdukcapil	
B	Provinsi		
1	Kebijakan Misi Ketiga : 1. Mendukung Pelaksanaan Program KTP-el 2. Melakukan Pembinaan di bidang Kependudukan 3. Melakukan Pembinaan di bidang Catatan Sipil sehingga diketahui jumlah Kelahiran, Kematian atau LAMPID diprovinsi Lampung	Renstra Provinsi	

3.2 Tujuan dan Sasaran Perubahan Renja – PD

Tujuan

- Meningkatkan Kualitas Pelayanan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil;

Sasaran

- Meningkatnya Kepemilikan Dokumen Kependudukan;
- Meningkatnya Kepemilikan Kutipan Akta Catatan Sipil;
- Meningkatnya Pemanfaatan Data dan Inovasi Pelayanan;

3.3 Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan

Pada Tahun 2024 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil melaksanakan 5 Program, 9 Kegiatan dan 25 Sub kegiatan dengan Belanja Operasi sebesar Rp.8.711.109.705,00 dan Belanja Modal sebesar Rp.520.090.000,00 dengan total Belanja Daerah Rp. 9.231.199.705,00, berdasarkan hasil evaluasi rencana kerja tahun 2024 mengalami Pengurangan Anggaran Kegiatan dan Sub Kegiatan, yang menjadikan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil melaksanakan 5 Program, 9 Kegiatan dan 25 Sub kegiatan dengan Belanja Operasi sebesar Rp.8.170.232.723,00 dan Belanja Modal sebesar Rp.531.090.000,00 dengan total Belanja Daerah Rp.8.701.322.723,00.

Secara terinci Program dan Kegiatan yang dilaksanakan pada Tahun Anggaran 2024 dijabarkan sebagai berikut :

- 1) Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kab/Kota, Pelaksanaan kegiatan ini berlokasi di Kecamatan Kotaagung Timur dengan anggaran sebesar Rp.9.226.915.005,00 mengalami pengurangan sebesar Rp.529.876.982,00 sehingga jumlah anggaran menjadi Rp.8.697.038.023,00 dengan rincian 5 Kegiatan dan 21 Sub Kegiatan sebagai berikut :

- a)Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah, Pelaksanaan kegiatan ini berlokasi di Kecamatan Kotaagung Timur dengan anggaran sebesar Rp.6,391,400.00 mengalami pengurangan sebesar Rp.3,049,600,00 Sehingga jumlah anggaran menjadi Rp. 3,341,800.00, Kegiatan ini terdiri dari 7 Sub Kegiatan dengan rincian Sub Kegiatan sebagai berikut :

- 1.) Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah, Pelaksanaan kegiatan ini berlokasi di Kecamatan Kotaagung Timur dengan anggaran sebesar Rp.2,773,700.00 mengalami pengurangan sebesar Rp.973,600.00 sehingga jumlah anggaran menjadi Rp. 1,800,100.00.
- 2.) Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD Pelaksanaan kegiatan ini berlokasi di Kecamatan Kotaagung Timur dengan anggaran sebesar Rp.750,000.00 mengalami pengurangan sebesar Rp.720,000.00 sehingga jumlah anggaran menjadi Rp. 30.000,00.

- 3.) Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD Pelaksanaan kegiatan ini berlokasi di Kecamatan Kotaagung Timur dengan anggaran sebesar Rp.645.000,00 mengalami pengurangan sebesar Rp.600.000,00 sehingga jumlah anggaran menjadi Rp. 45.000,00.
- 4.) Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD Pelaksanaan kegiatan ini berlokasi di Kecamatan Kotaagung Timur dengan anggaran sebesar Rp.600.000,00 mengalami pengurangan sebesar Rp.570.000,00 sehingga jumlah anggaran menjadi Rp.30.000,00.
- 5.) Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD Pelaksanaan kegiatan ini berlokasi di Kecamatan Kotaagung Timur dengan anggaran sebesar Rp.660.900,00 mengalami pengurangan sebesar Rp.186.000,00 sehingga jumlah anggaran menjadi Rp.474.900,00.
- 6.) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Pelaksanaan kegiatan ini berlokasi di Kecamatan Kotaagung Timur dengan anggaran sebesar Rp.660.900,00 dan tidak mengalami perubahan anggaran.
- 7.) Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah, Pelaksanaan kegiatan ini berlokasi di Kecamatan Kotaagung Timur dengan anggaran sebesar Rp. 300.900,00 dan tidak mengalami perubahan anggaran.

b) Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah, Pelaksanaan kegiatan ini berlokasi di Kecamatan Kotaagung Timur dengan anggaran sebesar Rp.6,016,215,151.00 mengalami pengurangan sebesar Rp.594,786,982.00 Sehingga jumlah anggaran menjadi Rp.5,421,428,169.00, Kegiatan ini terdiri dari 3 Sub Kegiatan dengan rincian Sub Kegiatan sebagai berikut :

1.) Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN, Pelaksanaan kegiatan ini berlokasi di Kecamatan Kotaagung Timur dengan anggaran sebesar Rp.4,390,155,151.00 mengalami pengurangan sebesar Rp.504,876,982.00 Sehingga jumlah anggaran menjadi Rp.3,885,278,169.00.

2.) Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN, Pelaksanaan kegiatan ini berlokasi di Kecamatan Kotaagung Timur dengan anggaran sebesar Rp.1,595,500,000.00 mengalami pengurangan sebesar Rp.89,910,000.00 Sehingga jumlah anggaran menjadi Rp.1,505,590,000.00.

3.) Pelaksanaan Penatausahaan dan Penguji/Verifikasi Keuangan SKPD, Pelaksanaan kegiatan ini berlokasi di Kecamatan Kotaagung Timur dengan anggaran sebesar Rp.30.560.000,00 dan tidak mengalami perubahan.

c) Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah, Pelaksanaan kegiatan ini berlokasi di Kecamatan Kotaagung Timur dengan anggaran sebesar Rp.221,654,600.00 mengalami penambahan sebesar

Rp. 45,905,000.00 Sehingga jumlah anggaran menjadi Rp.267,559,600.00, Kegiatan ini terdiri dari 4 Sub Kegiatan dengan rincian Sub Kegiatan sebagai berikut :

- 1.) Penyediaan Bahan Logistik Kantor, Pelaksanaan kegiatan ini berlokasi di Kecamatan Kotaagung Timur dengan anggaran sebesar Rp.57,880,800.00 mengalami pengurangan sebesar Rp.1,639,000.00 Sehingga jumlah anggaran menjadi Rp.56,241,800.00.
 - 2.) Penyediaan Bahan Cetak dan Penggandaan, Pelaksanaan kegiatan ini berlokasi di Kecamatan Kotaagung Timur dengan anggaran sebesar Rp.31,530,800.00 dan tidak mengalami perubahan.
 - 3.) Penyediaan Bahan/Material, Pelaksanaan kegiatan ini berlokasi di Kecamatan Kotaagung Timur dengan anggaran sebesar Rp. 40,999,000.00 dan tidak mengalami perubahan.
 - 4.) Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD, Pelaksanaan kegiatan ini berlokasi di Kecamatan Kotaagung Timur dengan anggaran sebesar Rp.91,244,000.00 mengalami penambahan sebesar Rp.47,544,000.00 Sehingga jumlah anggaran menjadi Rp.138,788,000.00
- d) Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah, Pelaksanaan kegiatan ini berlokasi di Kecamatan Kotaagung Timur dengan anggaran sebesar Rp.2,734,820,054.00 mengalami

penambahan sebesar Rp.9,369,000.00 Sehingga jumlah anggaran menjadi Rp.2,744,189,054.00, Kegiatan ini terdiri dari 3 Sub Kegiatan dengan rincian Sub Kegiatan sebagai berikut :

- 1.) Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik, Pelaksanaan kegiatan ini berlokasi di Kecamatan Kotaagung Timur dengan anggaran sebesar Rp.200,407,000.00 dan tidak mengalami perubahan.
 - 2.) Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor, Pelaksanaan kegiatan ini berlokasi di Kecamatan Kotaagung Timur dengan anggaran sebesar Rp.2,424,813,054.00 mengalami penambahan sebesar Rp.5,184,000.00 Sehingga jumlah anggaran menjadi Rp.2,429,997,054.00.
 - 3.) Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor, Pelaksanaan kegiatan ini berlokasi di Kecamatan Kotaagung Timur dengan anggaran sebesar Rp.109,600,000.00 mengalami penambahan sebesar Rp.4,185,000.00 Sehingga jumlah anggaran menjadi Rp.113,785,000.00.
- e) Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah, Pelaksanaan kegiatan ini berlokasi di Kecamatan Kotaagung Timur dengan anggaran sebesar Rp.247,833,800.00 mengalami penambahan sebesar Rp.12,685,600.00 Sehingga jumlah anggaran menjadi Rp.260,519,400.00

Kegiatan ini terdiri dari 4 Sub Kegiatan dengan rincian Sub Kegiatan sebagai berikut :

- 1.) Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan, Pelaksanaan kegiatan ini berlokasi di Kecamatan Kotaagung Timur dengan anggaran sebesar Rp.23,274,000.00 mengalami penambahan sebesar Rp.2,816,000.00 Sehingga jumlah anggaran menjadi Rp.26,090,000.00.
- 2.) Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan, Pelaksanaan kegiatan ini berlokasi di Kecamatan Kotaagung Timur dengan anggaran sebesar Rp.147,940,800.00 mengalami penambahan sebesar Rp.9,869,600.00 Sehingga jumlah anggaran menjadi Rp.157,810,400.00.
- 3.) Pemeliharaan dan Peralatan Mesin Lainnya, Pelaksanaan kegiatan ini berlokasi di Kecamatan Kotaagung Timur dengan anggaran sebesar Rp.47,810,000.00 dan tidak mengalami perubahan.
- 4.) Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya, Pelaksanaan kegiatan ini berlokasi di Kecamatan Kotaagung Timur dengan anggaran sebesar Rp.28,809,000.00 dan tidak mengalami perubahan anggaran.

2) Program Pendaftaran Penduduk, Pelaksanaan kegiatan ini berlokasi di Kecamatan Kotaagung Timur dengan anggaran sebesar Rp. 348.900,00 dan tidak mengalami perubahan anggaran, Program ini terdiri dari 1 kegiatan dan 1 Sub Kegiatan dengan rincian Sub Kegiatan sebagai berikut :

a) Kegiatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk, Pelaksanaan kegiatan ini berlokasi di Kecamatan Kotaagung Timur dengan anggaran sebesar Rp. 348.900,00 dan tidak mengalami perubahan anggaran, Kegiatan ini terdiri dari 1 Sub Kegiatan dengan rincian Sub Kegiatan sebagai berikut :

1.) Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk, Pelaksanaan kegiatan ini berlokasi di Kecamatan Kotaagung Timur dengan anggaran sebesar Rp. 348.900,00 dan tidak mengalami perubahan anggaran.

3) Program Pencatatan Sipil, Pelaksanaan kegiatan ini berlokasi di Kecamatan Kotaagung Timur dengan anggaran sebesar Rp.1.011.500,00 dan tidak mengalami perubahan anggaran, Program ini terdiri dari 1 Kegiatan dan 1 Sub Kegiatan sebagai berikut :

a) Kegiatan Pelayanan Pencatatan Sipil, Pelaksanaan kegiatan ini berlokasi di Kecamatan Kotaagung Timur dengan anggaran sebesar Rp.1.011.500,00 dan tidak mengalami perubahan anggaran, Kegiatan ini terdiri

dari 1 Sub Kegiatan dengan rincian Sub Kegiatan sebagai berikut :

1.) Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas Pelaporan Peristiwa Penting, Pelaksanaan kegiatan ini berlokasi di Kecamatan Kotaagung Timur dengan anggaran sebesar Rp.1.011.500,00 dan tidak mengalami perubahan anggaran.

4) Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan, Pelaksanaan kegiatan ini berlokasi di Kecamatan Kotaagung Timur dengan anggaran sebesar Rp.1.604.300,00 dan tidak mengalami perubahan anggaran, Program ini terdiri dari 1 Kegiatan dan 1 Sub Kegiatan sebagai berikut :

a.) Kegiatan Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan Penyajian Database Kependudukan, Pelaksanaan kegiatan ini berlokasi di Kecamatan Kotaagung Timur dengan anggaran sebesar Rp.1.604.300,00 dan tidak mengalami perubahan anggaran, Kegiatan ini terdiri dari 1 Sub Kegiatan dengan rincian Sub Kegiatan sebagai berikut :

1.) Kerjasama Pemanfaatan data Kependudukan, Pelaksanaan kegiatan ini berlokasi di Kecamatan Kotaagung Timur dengan anggaran sebesar Rp.1.604.300,00 dan tidak mengalami perubahan anggaran.

5) Program Pengelolaan Profil Kependudukan, Pelaksanaan kegiatan ini berlokasi di Kecamatan Kotaagung Timur dengan anggaran sebesar Rp.1,320,000.00 tidak mengalami perubahan. Program ini terdiri dari 1 Kegiatan dan 1 Sub Kegiatan sebagai berikut :

b) Kegiatan Penyusunan Profil Kependudukan, Pelaksanaan kegiatan ini berlokasi di Kecamatan Kotaagung Timur dengan anggaran sebesar Rp.1,320,000.00 tidak mengalami perubahan. Kegiatan ini terdiri dari 1 Sub Kegiatan dengan rincian Sub Kegiatan sebagai berikut :

1) Penyediaan Data Kependudukan Kabupaten/Kota, Pelaksanaan kegiatan ini berlokasi di Kecamatan Kotaagung Timur dengan anggaran sebesar Rp. Rp. 1,320,000.00 tidak mengalami perubahan.

Adapun hal – hal tersebut diatas selanjutnya disajikan dalam tabel 4,5,6 dan 7 sebagai berikut :

Tabel 4. RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PADA PERUBAHAN RENJA PD TAHUN 2024 KABUPATEN TANGGAMUS

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan		Rencana Tahun 2024												Prakiraan Maju Tahun 2025		Jenis Kegiatan	SKPD Penanggung jawab
				Kelompok Sasaran		Lokasi		Target Capaian Kinerja		Pagu Indikatif		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif				
				Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Jumlah Perubahan (+/-)	Sebelum Perubahan						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
2	12																		
2	12	01																	
2	12	01	2.01																
2	12	01	2.01	01															

2	12	01	2.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Asn dan Non ASN	Asn dan Non ASN	Kotaagung Timur	Kotaagung Timur	1	Dokumen	1	Dokumen	750.000	30.000	- 720.000	APBD Kabupaten	APBD Kabupaten	1	Dokumen	750.000,00	Sedang Berjalan	Dapat dilakukan Oleh satu OPD
2	12	01	2.01	03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Asn dan Non ASN	Asn dan Non ASN	Kotaagung Timur	Kotaagung Timur	1	Dokumen	1	Dokumen	645.000	45.000	- 600.000	APBD Kabupaten	APBD Kabupaten	1	Dokumen	645.000,00	Sedang Berjalan	Dapat dilakukan Oleh satu OPD
2	12	01	2.01	04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Asn dan Non ASN	Asn dan Non ASN	Kotaagung Timur	Kotaagung Timur	1	Dokumen	1	Dokumen	600.000	30.000	- 570.000	APBD Kabupaten	APBD Kabupaten	1	Dokumen	600.000,00	Sedang Berjalan	Dapat dilakukan Oleh satu OPD
2	12	01	2.01	05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Asn dan Non ASN	Asn dan Non ASN	Kotaagung Timur	Kotaagung Timur	1	Dokumen	1	Dokumen	660.900	474.900,000	- 186.000	APBD Kabupaten	APBD Kabupaten	1	Dokumen	660.900,00	Sedang Berjalan	Dapat dilakukan Oleh satu OPD

2	12	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Asn dan Non ASN	Asn dan Non ASN	Kotaagung Timur	Kotaagung Timur	6	Dokumen	6	Dokumen	660.900	660.900,000	0	APBD Kabupaten	APBD Kabupaten	6	Laporan	660.900,00	Sedang Berjalan	Dapat dilakukan Oleh satu OPD
2	12	01	2.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Asn dan Non ASN	Asn dan Non ASN	Kotaagung Timur	Kotaagung Timur	3	Dokumen	3	Dokumen	300.900	300.900,000	0	APBD Kabupaten	APBD Kabupaten	3	Laporan	300.900,00	Sedang Berjalan	Dapat dilakukan Oleh satu OPD
2	12	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Laporan Keuangan yang Disusun Tepat Waktu Keuangan	Persentase Laporan Keuangan yang Disusun Tepat Waktu Keuangan	Asn dan Non ASN	Asn dan Non ASN	Kotaagung Timur	Kotaagung Timur	100	%	100	%	6.016.215.151	5.421.428.169,00	-594.786.982	APBD Kabupaten	APBD Kabupaten	100	%	6.137.210.673,00	Sedang Berjalan	Dapat dilakukan Oleh satu OPD
2	12	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Asn dan Non ASN	Asn dan Non ASN	Kotaagung Timur	Kotaagung Timur	34	Orang	34	Orang	4.390.155.151	3.885.278.169,00	-504.876.982	APBD Kabupaten	APBD Kabupaten	34	Orang	4.545.583.273,00	Sedang Berjalan	Dapat dilakukan Oleh satu OPD
2	12	01	2.02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Asn dan Non ASN	Asn dan Non ASN	Kotaagung Timur	Kotaagung Timur	86	Orang	86	Orang	1.595.500.000	1.505.590.000,00	-89.910.000	APBD Kabupaten	APBD Kabupaten	12	Dokumen	1.521.571.400,00	Sedang Berjalan	Dapat dilakukan Oleh satu OPD

2	12	01	2.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Asn dan Non ASN	Asn dan Non ASN	Kotaagung Timur	Kotaagung Timur	12	Kali	12	Kali	30.560.000	30.560.000,00	0	APBD Kabupaten	APBD Kabupaten	12	Dokumen	70.056.000,00	Sedang Berjalan	Dapat dilakukan Oleh satu OPD
2	12	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Laporan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah yang Disusun dengan Baik	Persentase Laporan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah yang Disusun dengan Baik	Asn dan Non ASN	Asn dan Non ASN	Kotaagung Timur	Kotaagung Timur	-	%	-	%	0	-	0	APBD Kabupaten	APBD Kabupaten	-	%	66.000.000,00	Sedang Berjalan	Dapat dilakukan Oleh satu OPD
2	12	01	2.05	02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	Asn dan Non ASN	Asn dan Non ASN	Kotaagung Timur	Kotaagung Timur	0	Paket	0	Paket	0	-	0	APBD Kabupaten	APBD Kabupaten	0	Paket	66.000.000,00	Sedang Berjalan	Dapat dilakukan Oleh satu OPD
																							Sedang Berjalan	Dapat dilakukan Oleh satu OPD	
2	12	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Laporan Administrasi Umum Perangkat Daerah yang Disusun dengan Baik	Persentase Laporan Administrasi Umum Perangkat Daerah yang Disusun dengan Baik	Asn dan Non ASN	Asn dan Non ASN	Kotaagung Timur	Kotaagung Timur	100	%	100	%	221.654.600	267.559.600,00	45.905.000	APBD Kabupaten	APBD Kabupaten	100	%	423.191.540,00	Sedang Berjalan	Dapat dilakukan Oleh satu OPD
2	12	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Asn dan Non ASN	Asn dan Non ASN	Kotaagung Timur	Kotaagung Timur	-	Paket	-	Paket	0	-	0	APBD Kabupaten	APBD Kabupaten	-	Paket	-	Sedang Berjalan	Dapat dilakukan Oleh satu OPD
2	12	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Asn dan Non ASN	Asn dan Non ASN	Kotaagung Timur	Kotaagung Timur	898	Kotak	898	Kotak	57.880.800	56.241.800,00	-1.639.000	APBD Kabupaten	APBD Kabupaten	3	Paket	44.880.000,00		

2	12	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Pengandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Pengandaan yang Disediakan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Pengandaan yang Disediakan	Asn dan Non ASN	Asn dan Non ASN	Kotaagung Timur	Kotaagung Timur	5	Eksemplar	5	Eksemplar	31.530.800	31.530.800,00	0	APBD Kabupaten	APBD Kabupaten	1	paket	30.300.000,00	Sedang Berjalan	Dapat dilakukan Oleh satu OPD
2	12	01	2.06	07	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	Asn dan Non ASN	Asn dan Non ASN	Kotaagung Timur	Kotaagung Timur	1.566	Buah	1.566	Buah	40.999.000	40.999.000,00	0	APBD Kabupaten	APBD Kabupaten	2	Paket	64.353.540,00	Sedang Berjalan	Dapat dilakukan Oleh satu OPD
2	12	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Asn dan Non ASN	Asn dan Non ASN	Kotaagung Timur	Kotaagung Timur	84	Kali	84	Kali	91.244.000	138.788.000,00	47.544.000	APBD Kabupaten	APBD Kabupaten	84	Laporan	283.658.000,00	Sedang Berjalan	Dapat dilakukan Oleh satu OPD
																					Sedang Berjalan	Dapat dilakukan Oleh satu OPD	
2	12	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Laporan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang Disusun dengan Baik	Persentase Laporan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang Disusun dengan Baik	Asn dan Non ASN	Asn dan Non ASN	Kotaagung Timur	Kotaagung Timur	100	%	100	%	2.734.820.054	2.744.189.054,00	9.369.000,00	APBD Kabupaten	APBD Kabupaten	100	%	2.449.057.850,00	Sedang Berjalan	Dapat dilakukan Oleh satu OPD
2	12	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Asn dan Non ASN	Asn dan Non ASN	Kotaagung Timur	Kotaagung Timur	12	Kali	12	Kali	200.407.000	200.407.000,00	0	APBD Kabupaten	APBD Kabupaten	12	Laporan	196.836.000,00	Sedang Berjalan	Dapat dilakukan Oleh satu OPD
2	12	01	2.08	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Asn dan Non ASN	Asn dan Non ASN	Kotaagung Timur	Kotaagung Timur	50	Unit	50	Unit	2.424.813.054	2.429.997.054,00	5.184.000,00	APBD Kabupaten	APBD Kabupaten	5	Laporan	2.114.021.850,00	Sedang Berjalan	Dapat dilakukan Oleh satu OPD

2	12	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Asn dan Non ASN	Asn dan Non ASN	Kotaagung Timur	Kotaagung Timur	12	Kali	12	Kali	109.600.000	113.785.000,00	4.185.000,00	APBD Kabupaten	APBD Kabupaten	12	laporan	138.200.000,00	Sedang Berjalan	Dapat dilakukan Oleh satu OPD
2	12	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang Disusun dengan Baik	Persentase Laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang Disusun dengan Baik	Asn dan Non ASN	Asn dan Non ASN	Kotaagung Timur	Kotaagung Timur	100	%	100	%	247.833.800	260.519.400,00	12.685.600,00	APBD Kabupaten	APBD Kabupaten	100	%	286.159.000,00	Sedang Berjalan	Dapat dilakukan Oleh satu OPD
2	12	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	Asn dan Non ASN	Asn dan Non ASN	Kotaagung Timur	Kotaagung Timur	1	Unit	1	Unit	23.274.000	26.090.000,00	2.816.000,00	APBD Kabupaten	APBD Kabupaten	1	Unit	54.660.000,00	Sedang Berjalan	Dapat dilakukan Oleh satu OPD
2	12	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Asn dan Non ASN	Asn dan Non ASN	Kotaagung Timur	Kotaagung Timur	4	Unit	4	Unit	147.940.800	157.810.400,00	9.869.600,00	APBD Kabupaten	APBD Kabupaten	5	Unit	152.576.000,00	Sedang Berjalan	Dapat dilakukan Oleh satu OPD
2	12	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lain yang Dipelihara	Jumlah Peralatan dan Mesin Lain yang Dipelihara	Jumlah Peralatan dan Mesin Lain yang Dipelihara	Asn dan Non ASN	Asn dan Non ASN	Kotaagung Timur	Kotaagung Timur	33	Unit	33	Unit	47.810.000	47.810.000,00	-	APBD Kabupaten	APBD Kabupaten	33	Unit	57.110.000,00	Sedang Berjalan	Dapat dilakukan Oleh satu OPD

2	12	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Asn dan Non ASN	Asn dan Non ASN	Kotaagung Timur	Kotaagung Timur	1 Gedung	1 Gedung	28.809.000	28.809.000,00	-	APBD Kabupaten	APBD Kabupaten	1 Unit	21.813.000,00	Sedang Berjalan	Dapat dilakukan Oleh satu OPD
2	12	02			PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	Persentase Penduduk yang memiliki KTP-el	Persentase Penduduk yang memiliki KTP-el	Asn dan Non ASN	Asn dan Non ASN	Kotaagung Timur	Kotaagung Timur	100 %	100 %	348.900,00	348.900,00	0	APBD Kabupaten	APBD Kabupaten	100 %	348.900,00	Sedang Berjalan	Dapat dilakukan Oleh satu OPD
2	12	02	2.01		Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Persentase Keluarga yang memiliki Kartu keluarga	Persentase Keluarga yang memiliki Kartu keluarga	Asn dan Non ASN	Asn dan Non ASN	Kotaagung Timur	Kotaagung Timur	100 %	100 %	348.900,00	348.900,00	0	APBD Kabupaten	APBD Kabupaten	100 %	348.900,00	Sedang Berjalan	Dapat dilakukan Oleh satu OPD
2	12	02	2.01	01	Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan	Jumlah Dokumen Hasil Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan	Jumlah Dokumen Hasil Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan	Asn dan Non ASN	Asn dan Non ASN	Kotaagung Timur	Kotaagung Timur	- Dokumen	- Dokumen	-	-	0	APBD Kabupaten	APBD Kabupaten	- Dokumen	-	Sedang Berjalan	Dapat dilakukan Oleh satu OPD
2	12	02	2.01	02	Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pendaftaran Penduduk	Jumlah Dokumen Hasil Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pendaftaran Penduduk	Jumlah Dokumen Hasil Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pendaftaran Penduduk	Asn dan Non ASN	Asn dan Non ASN	Kotaagung Timur	Kotaagung Timur	- Dokumen	- Dokumen	-	-	0	APBD Kabupaten	APBD Kabupaten	- Dokumen	-	Sedang Berjalan	Dapat dilakukan Oleh satu OPD
2	12	02	2.01	04	Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Jumlah Laporan Hasil Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Jumlah Laporan Hasil Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Asn dan Non ASN	Asn dan Non ASN	Kotaagung Timur	Kotaagung Timur	4,00 Laporan	4,00 Laporan	348.900,00	348.900,00	0	APBD Kabupaten	APBD Kabupaten	4 Laporan	348.900,00	Sedang Berjalan	Dapat dilakukan Oleh satu OPD
2	12	02	2.02		Penataan Pendaftaran Penduduk	Persentase Penataan Pendaftaran Penduduk	Persentase Penataan Pendaftaran Penduduk	Asn dan Non ASN	Asn dan Non ASN			- %	- %	-	-	0	APBD Kabupaten	APBD Kabupaten	- %	-	Sedang Berjalan	Dapat dilakukan Oleh satu OPD

2	12	02	2,02	02	Pengadaan Dokumen Kependudukan selain Blangko KTP-el, Formulir, dan Buku terkait Pendaftaran Penduduk sesuai dengan kebutuhan	Jumlah Dokumen Kependudukan selain Blangko KTP-El, Formulir, dan Buku terkait Pendaftaran Penduduk Sesuai dengan kebutuhan yang Tersedia	Jumlah Dokumen Kependudukan selain Blangko KTP-El, Formulir, dan Buku terkait Pendaftaran Penduduk Sesuai dengan kebutuhan yang Tersedia	Asn dan Non ASN	Asn dan Non ASN	Kotaagung Timur	Kotaagung Timur	-	Dokumen	-	Dokumen	-	0	APBD Kabupaten	APBD Kabupaten	-	Dokumen	-	Sedang Berjalan	Dapat dilakukan Oleh satu OPD	
2	12	02	2,04		Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk	Persentase Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk	Persentase Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk	Asn dan Non ASN	Asn dan Non ASN			-	%	-	%	-	0	APBD Kabupaten	APBD Kabupaten	-	%	-	Sedang Berjalan	Dapat dilakukan Oleh satu OPD	
2	12	02	2,04	02	Pembinaan dan Pengawasan Terkait Pendaftaran Penduduk	Jumlah Pemangku Kepentingan dan Masyarakat yang Mendapat Komunikasi, Informasi, dan Edukasi Terkait Pendaftaran Penduduk	Jumlah Pemangku Kepentingan dan Masyarakat yang Mendapat Komunikasi, Informasi, dan Edukasi Terkait Pendaftaran Penduduk	Asn dan Non ASN	Asn dan Non ASN	Kotaagung Timur	Kotaagung Timur	-	Laporan	-	Laporan	-	0	APBD Kabupaten	APBD Kabupaten	-	Laporan	-	Sedang Berjalan	Dapat dilakukan Oleh satu OPD	
2	12	02	2,04	03	Bimbingan teknisi terkait Pendaftaran Penduduk	Jumlah Laporan bimbingan Teknis Terkait Pendaftaran Penduduk	Jumlah Laporan bimbingan Teknis Terkait Pendaftaran Penduduk	Asn dan Non ASN	Asn dan Non ASN	Kotaagung Timur	Kotaagung Timur	-	Laporan	-	Laporan	-	0	APBD Kabupaten	APBD Kabupaten	-	Laporan	-	Sedang Berjalan	Dapat dilakukan Oleh satu OPD	
2	12	03			PROGRAM PENCATATAN SIPIL	Persentase Penerbitan Akta Kelahiran	Persentase Penerbitan Akta Kelahiran	Asn dan Non ASN	Asn dan Non ASN	Kotaagung Timur	Kotaagung Timur	100	%	100	%	1.011.500,00	1.011.500,00	0	APBD Kabupaten	APBD Kabupaten	100	%	1.011.500,00	Sedang Berjalan	Dapat dilakukan Oleh satu OPD

2	12	03	2.01		Pelayanan Pencatatan Sipil	Persentase Penerbitan Akta Kelahiran Usia 0 - 18 Tahun	Persentase Penerbitan Akta Kelahiran Usia 0 - 18 Tahun	Asn dan Non ASN	Asn dan Non ASN	Kotaagung Timur	Kotaagung Timur	100	%	100	%	1.011.500,00	1.011.500,00	0	APBD Kabupaten	APBD Kabupaten	100	%	1.011.500,00	Sedang Berjalan	Dapat dilakukan Oleh satu OPD
2	12	03	2.01	01	Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Penting	Jumlah Dokumen Hasil Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Penting	Jumlah Dokumen Hasil Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Penting	Asn dan Non ASN	Asn dan Non ASN	Kotaagung Timur	Kotaagung Timur	4.200	Akta	4.200	Akta	1.011.500,00	1.011.500,00	0	APBD Kabupaten	APBD Kabupaten	4.200	Dokumen	1.011.500,00	Sedang Berjalan	Dapat dilakukan Oleh satu OPD
2	12	03	2.01	05	Pengadaan Dokumen Kependudukan selain Blangko KTP-el, Formulir, dan Buku terkait Pencatatan Sipil sesuai dengan kebutuhan	Jumlah Dokumen Kependudukan selain Blangko KTP-el, Formulir, dan Buku terkait Pencatatan Sipil sesuai dengan kebutuhan yang Tersedia	Jumlah Dokumen Kependudukan selain Blangko KTP-el, Formulir, dan Buku terkait Pencatatan Sipil sesuai dengan kebutuhan yang Tersedia	Asn dan Non ASN	Asn dan Non ASN	Kotaagung Timur	Kotaagung Timur	-	Paket	-	Paket	-	-	0	APBD Kabupaten	APBD Kabupaten	-	Paket	-	Sedang Berjalan	Dapat dilakukan Oleh satu OPD
2	12	03	2.02		Penyelenggaraan Pencatatan Sipil	Persentase Penyelenggaraan Pencatatan Sipil	Persentase Penyelenggaraan Pencatatan Sipil	Asn dan Non ASN	Asn dan Non ASN			100	%	100	%		-	0	APBD Kabupaten	APBD Kabupaten	100	%	-	Sedang Berjalan	Dapat dilakukan Oleh satu OPD

2	12	03	2,02	01	Koordinasi dengan kantor kementerian yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang Agama Kabupaten/Kota dan Pengadilan Agama yang berkaitan dengan Pencatatan Nikah, Talak, Cerai dan Rujuk bagi Penduduk yang Beragama Islam	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dengan Kantor Kementerian yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang Agama Kabupaten/Kota dan Pengadilan Agama yang Berkaitan dengan Pencatatan Nikah, Talak, Cerai, dan Rujuk bagi Penduduk yang Beragama Islam	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dengan Kantor Kementerian yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang Agama Kabupaten/Kota dan Pengadilan Agama yang Berkaitan dengan Pencatatan Nikah, Talak, Cerai, dan Rujuk bagi Penduduk yang Beragama Islam	Asn dan Non ASN	Asn dan Non ASN	Kotaagung Timur	Kotaagung Timur	-	Laporan	-	Laporan	-	0	APBD Kabupaten	APBD Kabupaten	-	Laporan	-	Sedang Berjalan	Dapat dilakukan Oleh satu OPD
2	12	03	2,02	08	Sosialisasi terkait Pencatatan Sipil	Jumlah Laporan Hasil sosialisasi Pencatatan Sipil	Jumlah Laporan Hasil sosialisasi Pencatatan Sipil	Asn dan Non ASN	Asn dan Non ASN	Kotaagung Timur	Kotaagung Timur	-	Laporan	-	Laporan	-	0	APBD Kabupaten	APBD Kabupaten	-	Laporan	-	Sedang Berjalan	Dapat dilakukan Oleh satu OPD
2	12	03	2,03		Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pencatatan Sipil	Persentase Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pencatatan Sipil	Persentase Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pencatatan Sipil	Asn dan Non ASN	Asn dan Non ASN			-	%	-	%	-	0	APBD Kabupaten	APBD Kabupaten	-	%	-	Sedang Berjalan	Dapat dilakukan Oleh satu OPD
2	12	03	2,03	02	Pembinaan dan Pengawasan terkait Pencatatan Sipil	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan yang Telah Dilakukan	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan yang Telah Dilakukan	Asn dan Non ASN	Asn dan Non ASN	Kotaagung Timur	Kotaagung Timur	-	Laporan	-	Laporan	-	0	APBD Kabupaten	APBD Kabupaten	-	Laporan	-	Sedang Berjalan	Dapat dilakukan Oleh satu OPD

2	12	03	2.03	04	Bimbingan teknisterkait Pencatatan Sipil	Jumlah Laporan Hasil Bimbingan Teknis Terkait Pencatatan Sipil	Jumlah Laporan Hasil Bimbingan Teknis Terkait Pencatatan Sipil	Asn dan Non ASN	Asn dan Non ASN	Kotaagung Timur	Kotaagung Timur	-	Laporan	Laporan	-	0	APBD Kabupaten	APBD Kabupaten	-	Laporan	-	Sedang Berjalan	Dapat dilakukan Oleh satu OPD		
															0										
2	12	04			PROGRAM PENGELOLAN INFORMASIAADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	Persentase OPD yang Melakukan PKS	Persentase OPD yang Melakukan PKS	Asn dan Non ASN	Asn dan Non ASN	Kotaagung Timur	Kotaagung Timur	100	%	100	%	1.604.300,00	1.604.300,00	0	APBD Kabupaten	APBD Kabupaten	100	%	2.752.400,00	Sedang Berjalan	Dapat dilakukan Oleh satu OPD
2	12	04	2.01		Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan	Persentase OPD yang mengajukan PKS	Persentase OPD yang mengajukan PKS	Asn dan Non ASN	Asn dan Non ASN	Kotaagung Timur	Kotaagung Timur	100	%	100	%	1.604.300,00	1.604.300,00	0	APBD Kabupaten	APBD Kabupaten	100	%	2.752.400,00	Sedang Berjalan	Dapat dilakukan Oleh satu OPD
2	12	04	2.01	01	Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan	Jumlah Dokumen Data Kependudukan yang Diolah dan Disajikan	Jumlah Dokumen Data Kependudukan yang Diolah dan Disajikan	Asn dan Non ASN	Asn dan Non ASN	Kotaagung Timur	Kotaagung Timur	-	Dokumen	Dokumen	-	0	APBD Kabupaten	APBD Kabupaten	-	Dokumen	-	Sedang Berjalan	Dapat dilakukan Oleh satu OPD		
2	12	04	2.01	02	Kerjasama Pemanfaatan Data Kependudukan	Jumlah Dokumen Kerja Sama Pemanfaatan Data Kependudukan	Jumlah Dokumen Kerja Sama Pemanfaatan Data Kependudukan	Asn dan Non ASN	Asn dan Non ASN	Kotaagung Timur	Kotaagung Timur	32	Dokumen	32	Dokumen	1.604.300,00	1.604.300,00	0	APBD Kabupaten	APBD Kabupaten	32	Dokumen	2.752.400,00	Sedang Berjalan	Dapat dilakukan Oleh satu OPD
2	12	04	2.03		Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Persentase Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Persentase Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Asn dan Non ASN	Asn dan Non ASN	Kotaagung Timur	Kotaagung Timur	-	%	-	%	0	APBD Kabupaten	APBD Kabupaten	-	%	-	Sedang Berjalan	Dapat dilakukan Oleh satu OPD		

2	12	04	2.03	01	Koordinasi Antar Lembaga Pemerintah dan Lembaga Non-Pemerintah di Kabupaten/Kota dalam Penerbitan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Antar Lembaga Pemerintah dan Lembaga Non-Pemerintah di Kabupaten/Kota dalam Penertiban Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Antar Lembaga Pemerintah dan Lembaga Non-Pemerintah di Kabupaten/Kota dalam Penertiban Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Asn dan Non ASN	Asn dan Non ASN	Kotaagung Timur	Kotaagung Timur	-	Laporan	-	Laporan	-	0	APBD Kabupaten	APBD Kabupaten	-	Laporan	-	Sedang Berjalan	Dapat dilakukan Oleh satu OPD
2	12	04	2.03	04	Penyelenggaraan Pemanfaatan Data Kependudukan	Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Pemanfaatan Data Kependudukan	Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Pemanfaatan Data Kependudukan	Asn dan Non ASN	Asn dan Non ASN	Kotaagung Timur	Kotaagung Timur	-	Dokumen	-	Dokumen	-	0	APBD Kabupaten	APBD Kabupaten	-	Dokumen	-	Sedang Berjalan	Dapat dilakukan Oleh satu OPD
2	12	04	2.03	05	Sosialisasi terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Jumlah Laporan Hasil Sosialisasi Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Jumlah Laporan Hasil Sosialisasi Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Asn dan Non ASN	Asn dan Non ASN	Kotaagung Timur	Kotaagung Timur	-	Laporan	-	Laporan	-	0	APBD Kabupaten	APBD Kabupaten	-	Laporan	-	Sedang Berjalan	Dapat dilakukan Oleh satu OPD
2	12	04	2.03	06	Kerjasama dengan Organisasi kemasyarakatan dan Perguruan Tinggi	jumlah Dokumen Kerjasama dengan Organisasi kemasyarakatan dan Perguruan Tinggi	jumlah Dokumen Kerjasama dengan Organisasi kemasyarakatan dan Perguruan Tinggi	Asn dan Non ASN	Asn dan Non ASN	Kotaagung Timur	Kotaagung Timur	-	Dokumen	-	Dokumen	-	0	APBD Kabupaten	APBD Kabupaten	-	Dokumen	-	Sedang Berjalan	Dapat dilakukan Oleh satu OPD
2	12	04	2.03	08	Penyajian Data Kependudukan Yang Akurat dan dapat Dipertanggungjawabkan	Jumlah Data Kependudukan yang Akurat dan Dapat Dipertanggungjawabkan	Jumlah Data Kependudukan yang Akurat dan Dapat Dipertanggungjawabkan	Asn dan Non ASN	Asn dan Non ASN	Kotaagung Timur	Kotaagung Timur	20	Dokumen	20	Dokumen	-	0	APBD Kabupaten	APBD Kabupaten	-	Dokumen	-	Sedang Berjalan	Dapat dilakukan Oleh satu OPD

2	12	04	2.04		Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Persentase Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Persentase Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Asn dan Non ASN	Asn dan Non ASN	Kotaagung Timur	Kotaagung Timur	100	%	100	%	-	0	APBD Kabupaten	APBD Kabupaten	100	%	-	Sedang Berjalan	Dapat dilakukan Oleh satu OPD	
2	12	04	2.04	03	Bimbingan Teknis terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pendayagunaan Data Kependudukan	Jumlah Laporan Hasil Bimbingan Teknis Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pendayagunaan Data Kependudukan	Jumlah Laporan Hasil Bimbingan Teknis Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pendayagunaan Data Kependudukan	Asn dan Non ASN	Asn dan Non ASN	Kotaagung Timur	Kotaagung Timur	-	Laporan	-	Laporan	-	0	APBD Kabupaten	APBD Kabupaten	-	Laporan	-	Sedang Berjalan	Dapat dilakukan Oleh satu OPD	
																0									
2	12	05			PROGRAM PENGOLAHAN PROFIL KEPENDUDUKAN	Persentase profil Kependudukan Berdasarkan Jenis Kelamin	Persentase profil Kependudukan Berdasarkan Jenis Kelamin	Asn dan Non ASN	Asn dan Non ASN	Kotaagung Timur	Kotaagung Timur	100	%	100	%	1.320.000,00	1.320.000,00	0	APBD Kabupaten	APBD Kabupaten	100	%	7.620.000,00	Sedang Berjalan	Dapat dilakukan Oleh satu OPD
2	12	05	2.01		Penyusunan Profil Kependudukan	Persentase Penerbitan Buku Profil Kependudukan	Persentase Penerbitan Buku Profil Kependudukan	Asn dan Non ASN	Asn dan Non ASN	Kotaagung Timur	Kotaagung Timur	100	%	100	%	1.320.000,00	1.320.000,00	0	APBD Kabupaten	APBD Kabupaten	100	%	7.620.000,00	Sedang Berjalan	Dapat dilakukan Oleh satu OPD
2	12	05	2.01	01	Penyediaan data kependudukan kabupaten/kota	Jumlah Data Kependudukan Kabupaten/Kota	Jumlah Data Kependudukan Kabupaten/Kota	Asn dan Non ASN	Asn dan Non ASN	Kotaagung Timur	Kotaagung Timur	2,00	Semester	2,00	Semester	1.320.000,00	1.320.000,00	0	APBD Kabupaten	APBD Kabupaten	2	Dokumen	7.620.000,00	Sedang Berjalan	Dapat dilakukan Oleh satu OPD
2	12	05	2.01	02	Penyusunan Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta kebutuhan yang lain	Jumlah Dokumen Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta Kebutuhan yang Lain	Jumlah Dokumen Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta Kebutuhan yang Lain	Asn dan Non ASN	Asn dan Non ASN	Kotaagung Timur	Kotaagung Timur	0	Dokumen	0	Dokumen			0	APBD Kabupaten	APBD Kabupaten	0	Dokumen	0,00	Sedang Berjalan	Dapat dilakukan Oleh satu OPD
Jumlah																9.231.199.705	8.701.322.723	(529.876.982)	Jumlah			9.379.743.263,00			

Tabel 5. RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PADA PERUBAHAN RENJA PD TAHUN 2024 KABUPATEN TANGGAMUS SUMBER DANA APBD PROVINSI LAMPUNG

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan		Rencana Tahun 2024										Prakiraan Maju Tahun 2025		Jenis Kegiatan	SKPD Penanggung jawab	
				Kelompok Sasaran		Lokasi		Target Capaian Kinerja		Pagu Indikatif		Jumlah Perubahan (+/-)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif
		Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan		16	17				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19

Tabel 6. RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PADA PERUBAHAN RENJA PD TAHUN 2024 KABUPATEN TANGGAMUS SUMBER DANA APBN

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan		Rencana Tahun 2024										Prakiraan Maju Tahun		Jenis Kegiatan	SKPD Penanggung jawab		
				Kelompok Sasaran		Lokasi		Target Capaian		Pagu Indikatif		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif				
		Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Jumlah Perubahan (+/-)	Sebelum Perubahan					Sesudah Perubahan	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	

Tabel 7. RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH PADA PERUBAHAN RENJA PD TAHUN 2024 KABUPATEN TANGGAMUS SUMBER DANA APBD KABUPATEN, APBD PROVINSI DAN APBN

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintah	Prioritas Daerah *)	Sasaran Daerah *)	Lokasi	Indikator kinerja						Pagu Indikatif Tahun 2024	Pagu Indikatif Tahun 2025	Indikator kinerja							
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				OPD **)	Jenis Kegiatan ***)	Sumber Dana ****)					
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16					
2	12					100	%		100	%		100	%	8.701.322.723	9.379.743.263,00	Dapat dilakukan Oleh satu OPD	Sedang Berjalan	APBD Kabupaten		
2	12	01		Kotaagung Timur	Opini BPK Terhadap Laporan Keuangan	100	%	Opini BPK Terhadap Laporan Keuangan	100	%	Opini BPK Terhadap Laporan Keuangan	100	%	8.697.038.023	9.368.010.463,00	Dapat dilakukan Oleh satu OPD	Sedang Berjalan	APBD Kabupaten		
2	12	01	2.01	Kotaagung Timur	Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja yang Disusun dengan Baik dan Tepat Waktu Keuangan	100	%	Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja yang Disusun dengan Baik dan Tepat Waktu Keuangan	100	%	Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja yang Disusun dengan Baik dan Tepat Waktu Keuangan	100	%	3.341.800	6.391.400,00	Dapat dilakukan Oleh satu OPD	Sedang Berjalan	APBD Kabupaten		
2	12	01	2.01	01	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan dan Stabilitas Kamtibmas	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik yang Ditopang oleh Efisiensi Struktur Pemerintahan, Kapasitas Pegawai Pemerintah dan Lembaga Legislatif	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3	Dokumen	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3	Dokumen	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3	Dokumen	1.800.100	2.773.700,00	Dapat dilakukan Oleh satu OPD	Sedang Berjalan	APBD Kabupaten
2	12	01	2.01	02	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan dan Stabilitas Kamtibmas	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik yang Ditopang oleh Efisiensi Struktur Pemerintahan, Kapasitas Pegawai Pemerintah dan Lembaga Legislatif	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1	Dokumen	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1	Dokumen	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1	Dokumen	30.000	750.000,00	Dapat dilakukan Oleh satu OPD	Sedang Berjalan	APBD Kabupaten
2	12	01	2.01	03	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan dan Stabilitas Kamtibmas	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik yang Ditopang oleh Efisiensi Struktur Pemerintahan, Kapasitas Pegawai Pemerintah dan Lembaga Legislatif	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1	Dokumen	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1	Dokumen	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1	Dokumen	45.000	645.000,00	Dapat dilakukan Oleh satu OPD	Sedang Berjalan	APBD Kabupaten

2	12	01	2.01	04	Koordinasi dan Penyusunan DP A-SKPD	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan dan Stabilitas Kamtibmas	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik yang Ditopang oleh Efisiensi Struktur Pemerintahan, Kapasitas Pegawai Pemerintah dan Lembaga Legislatif	Kotaagung Timur	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1	Dokumen	1	Dokumen	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1	Dokumen	30.000	600.000,00	Dapat dilakukan Oleh satu OPD	Sedang Berjalan	APBD Kabupaten
2	12	01	2.01	05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DP A-SKPD	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan dan Stabilitas Kamtibmas	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik yang Ditopang oleh Efisiensi Struktur Pemerintahan, Kapasitas Pegawai Pemerintah dan Lembaga Legislatif	Kotaagung Timur	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1	Dokumen	1	Dokumen	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1	Dokumen	474.900,000	660.900,00	Dapat dilakukan Oleh satu OPD	Sedang Berjalan	APBD Kabupaten
2	12	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Rkhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan dan Stabilitas Kamtibmas	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik yang Ditopang oleh Efisiensi Struktur Pemerintahan, Kapasitas Pegawai Pemerintah dan Lembaga Legislatif	Kotaagung Timur	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Rkhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Rkhtisar Realisasi Kinerja SKPD	6	Dokumen	6	Dokumen	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Rkhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Rkhtisar Realisasi Kinerja SKPD	6	Dokumen	660.900,000	660.900,00	Dapat dilakukan Oleh satu OPD	Sedang Berjalan	APBD Kabupaten
2	12	01	2.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan dan Stabilitas Kamtibmas	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik yang Ditopang oleh Efisiensi Struktur Pemerintahan, Kapasitas Pegawai Pemerintah dan Lembaga Legislatif	Kotaagung Timur	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3	Dokumen	3	Dokumen	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3	Dokumen	300.900,000	300.900,00	Dapat dilakukan Oleh satu OPD	Sedang Berjalan	APBD Kabupaten
2	12	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			Kotaagung Timur	Persentase Laporan Keuangan yang Disusun Tepat Waktu Keuangan	100	%	100	%	Persentase Laporan Keuangan yang Disusun Tepat Waktu Keuangan	100	%	5.421.428.169,00	6.137.210.673,00	Dapat dilakukan Oleh satu OPD	Sedang Berjalan	APBD Kabupaten
2	12	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan dan Stabilitas Kamtibmas	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik yang Ditopang oleh Efisiensi Struktur Pemerintahan, Kapasitas Pegawai Pemerintah dan Lembaga Legislatif	Kotaagung Timur	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	34	Orang	34	Orang	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	34	Orang	3.885.278.169,00	4.545.583.273,00	Dapat dilakukan Oleh satu OPD	Sedang Berjalan	APBD Kabupaten

2	12	01	2.02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan dan Stabilitas Kamtibmas	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik yang Ditopang oleh Efisiensi Struktur Pemerintahan, Kapasitas Pegawai Pemerintah dan Lembaga Legislatif	Kotaagung Timur	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	86	Orang	86	Orang	1.505.590.000,00	1.521.571.400,00	Dapat dilakukan Oleh satu OPD	Sedang Berjalan	APBD Kabupaten
2	12	01	2.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan dan Stabilitas Kamtibmas	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik yang Ditopang oleh Efisiensi Struktur Pemerintahan, Kapasitas Pegawai Pemerintah dan Lembaga Legislatif	Kotaagung Timur	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12	Kali	12	Kali	30.560.000,00	70.056.000,00	Dapat dilakukan Oleh satu OPD	Sedang Berjalan	APBD Kabupaten
2	12	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			Kotaagung Timur	Persentase Laporan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah yang Disusun dengan Baik	-	%	-	%	66.000.000,00		Dapat dilakukan Oleh satu OPD	Sedang Berjalan	APBD Kabupaten
2	12	01	2.05	02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan dan Stabilitas Kamtibmas	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik yang Ditopang oleh Efisiensi Struktur Pemerintahan, Kapasitas Pegawai Pemerintah dan Lembaga Legislatif	Kotaagung Timur	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	0	Paket	0	Paket	-	66.000.000,00	Dapat dilakukan Oleh satu OPD	Sedang Berjalan	APBD Kabupaten
2	12	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah			Kotaagung Timur	Persentase Laporan Administrasi Umum Perangkat Daerah yang Disusun dengan Baik	100	%	100	%	267.559.600,00	423.191.540,00	Dapat dilakukan Oleh satu OPD	Sedang Berjalan	APBD Kabupaten
2	12	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan dan Stabilitas Kamtibmas	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik yang Ditopang oleh Efisiensi Struktur Pemerintahan, Kapasitas Pegawai Pemerintah dan Lembaga Legislatif	Kotaagung Timur	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	-	Paket	-	Paket	-	-	Dapat dilakukan Oleh satu OPD	Sedang Berjalan	APBD Kabupaten

2	12	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan dan Stabilitas Kamtibmas	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik yang Ditopang oleh Efisiensi Struktur Pemerintahan, Kapasitas Pegawai Pemerintah dan Lembaga Legislatif	Kotaagung Timur	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	898	Kotak	898	Kotak	898	Kotak	56.241.800,00	44.880.000,00			APBD Kabupaten
2	12	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Pengandaan	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan dan Stabilitas Kamtibmas	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik yang Ditopang oleh Efisiensi Struktur Pemerintahan, Kapasitas Pegawai Pemerintah dan Lembaga Legislatif	Kotaagung Timur	Jumlah Paket Barang Cetak dan Pengandaan yang Disediakan	5	Eksemplar	5	Eksemplar	5	Eksemplar	31.530.800,00	30.300.000,00	Dapat dilakukan Oleh satu OPD	Sedang Berjalan	APBD Kabupaten
2	12	01	2.06	07	Penyediaan Bahan/Material	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan dan Stabilitas Kamtibmas	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik yang Ditopang oleh Efisiensi Struktur Pemerintahan, Kapasitas Pegawai Pemerintah dan Lembaga Legislatif	Kotaagung Timur	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	1.566	Buah	1.566	Buah	1.566	Buah	40.999.000,00	64.353.540,00	Dapat dilakukan Oleh satu OPD	Sedang Berjalan	APBD Kabupaten
2	12	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan dan Stabilitas Kamtibmas	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik yang Ditopang oleh Efisiensi Struktur Pemerintahan, Kapasitas Pegawai Pemerintah dan Lembaga Legislatif	Kotaagung Timur	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	84	Kali	84	Kali	84	Kali	138.788.000,00	283.658.000,00	Dapat dilakukan Oleh satu OPD	Sedang Berjalan	APBD Kabupaten
									...									Dapat dilakukan Oleh satu OPD	Sedang Berjalan	
2	12	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			Kotaagung Timur	Persentase Laporan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang Disusun dengan Baik	100	%	100	%	100	%	2.744.189.054,00	2.449.057.850,00	Dapat dilakukan Oleh satu OPD	Sedang Berjalan	APBD Kabupaten
2	12	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan dan Stabilitas Kamtibmas	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik yang Ditopang oleh Efisiensi Struktur Pemerintahan, Kapasitas Pegawai Pemerintah dan Lembaga Legislatif	Kotaagung Timur	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12	Kali	12	Kali	12	Kali	200.407.000,00	196.836.000,00	Dapat dilakukan Oleh satu OPD	Sedang Berjalan	APBD Kabupaten

2	12	01	2.08	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan dan Stabilitas Kamtibmas	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik yang Ditopang oleh Efisiensi Struktur Pemerintahan, Kapasitas Pegawai Pemerintah dan Lembaga Legislatif	Kotaagung Timur	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	50	Unit	50	Unit	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	50	Unit	2.429.997.054,00	2.114.021.850,00	Dapat dilakukan Oleh satu OPD	Sedang Berjalan	APBD Kabupaten
2	12	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan dan Stabilitas Kamtibmas	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik yang Ditopang oleh Efisiensi Struktur Pemerintahan, Kapasitas Pegawai Pemerintah dan Lembaga Legislatif	Kotaagung Timur	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12	Kali	12	Kali	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12	Kali	113.785.000,00	138.200.000,00	Dapat dilakukan Oleh satu OPD	Sedang Berjalan	APBD Kabupaten
																		Dapat dilakukan Oleh satu OPD	Sedang Berjalan		
2	12	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			Kotaagung Timur	Persentase Laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang Disusun dengan Baik	100	%	100	%	Persentase Laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang Disusun dengan Baik	100	%	260.519.400,00	286.159.000,00	Dapat dilakukan Oleh satu OPD	Sedang Berjalan	APBD Kabupaten
2	12	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan dan Stabilitas Kamtibmas	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik yang Ditopang oleh Efisiensi Struktur Pemerintahan, Kapasitas Pegawai Pemerintah dan Lembaga Legislatif	Kotaagung Timur	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	1	Unit	1	Unit	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	1	Unit	26.090.000,00	54.660.000,00	Dapat dilakukan Oleh satu OPD	Sedang Berjalan	APBD Kabupaten
2	12	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan dan Stabilitas Kamtibmas	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik yang Ditopang oleh Efisiensi Struktur Pemerintahan, Kapasitas Pegawai Pemerintah dan Lembaga Legislatif	Kotaagung Timur	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	4	Unit	4	Unit	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	4	Unit	157.810.400,00	152.576.000,00	Dapat dilakukan Oleh satu OPD	Sedang Berjalan	APBD Kabupaten
2	12	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan dan Stabilitas Kamtibmas	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik yang Ditopang oleh Efisiensi Struktur Pemerintahan, Kapasitas Pegawai Pemerintah dan Lembaga Legislatif	Kotaagung Timur	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	33	Unit	33	Unit	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	33	Unit	47.810.000,00	57.110.000,00	Dapat dilakukan Oleh satu OPD	Sedang Berjalan	APBD Kabupaten

2	12	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan dan Stabilitas Kamtibmas	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik yang Ditopang oleh Efisiensi Struktur Pemerintahan, Kapasitas Pegawai Pemerintah dan Lembaga Legislatif	Kota taagung Timur	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1	Gedung	1	Gedung	28.809.000,00	21.813.000,00	Dapat dilakukan Oleh satu OPD	Sedang Berjalan	APBD Kabupaten
2	12	02			PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK			Kota taagung Timur	Persentase Penduduk yang memiliki KTP-el	100	%	100	%	348.900,00	348.900,00	Dapat dilakukan Oleh satu OPD	Sedang Berjalan	APBD Kabupaten
2	12	02	2.01		Pelayanan Pendaftaran Penduduk			Kota taagung Timur	Persentase Keluarga yang memiliki Kartu keluarga	100	%	100	%	348.900,00	348.900,00	Dapat dilakukan Oleh satu OPD	Sedang Berjalan	APBD Kabupaten
2	12	02	2.01	01	Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan			Kota taagung Timur	Jumlah Dokumen Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan	-	Dokumen	-	Dokumen	-	-	Dapat dilakukan Oleh satu OPD	Sedang Berjalan	APBD Kabupaten
2	12	02	2.01	02	Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pendaftaran Penduduk			Kota taagung Timur	Jumlah Dokumen Hasil Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pendaftaran Penduduk	-	Dokumen	-	Dokumen	-	-	Dapat dilakukan Oleh satu OPD	Sedang Berjalan	APBD Kabupaten
2	12	02	2.01	04	Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan dan Stabilitas Kamtibmas	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik yang Ditopang oleh Efisiensi Struktur Pemerintahan, Kapasitas Pegawai Pemerintah dan Lembaga Legislatif	Kota taagung Timur	Jumlah Laporan Hasil Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk	4,00	Laporan	4,00	Laporan	348.900,00	348.900,00	Dapat dilakukan Oleh satu OPD	Sedang Berjalan	APBD Kabupaten
2	12	02	2.02		Penataan Pendaftaran Penduduk				Persentase Penataan Pendaftaran Penduduk	-	%	-	%	-	-	Dapat dilakukan Oleh satu OPD	Sedang Berjalan	APBD Kabupaten
2	12	02	2.02	02	Pengadaan Dokumen Kependudukan selain Blanko KTP-el, Formulir, dan Buku terkait Pendaftaran Penduduk sesuai dengan kebutuhan			Kota taagung Timur	Jumlah Dokumen Kependudukan selain Blanko KTP-El, Formulir, dan Buku Terkait Pendaftaran Penduduk Sesuai dengan Kebutuhan yang Tersedia	-	Dokumen	-	Dokumen	-	-	Dapat dilakukan Oleh satu OPD	Sedang Berjalan	APBD Kabupaten

2	12	02	2.04		Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk				Persentase Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk	-	%			Persentase Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk	-	%			Persentase Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk	-	%			Dapat dilakukan Oleh satu OPD	Sedang Berjalan	APBD Kabupaten
2	12	02	2.04	02	Pembinaan dan Pengawasan Terkait Pendaftaran Penduduk			Kota taagung Timur	Jumlah Pemangku Kepentingan dan Masyarakat yang Mendapat Komunikasi, Informasi, dan Edukasi Terkait Pendaftaran Penduduk	-	Laporan			Jumlah Pemangku Kepentingan dan Masyarakat yang Mendapat Komunikasi, Informasi, dan Edukasi Terkait Pendaftaran Penduduk	-	Laporan			Jumlah Pemangku Kepentingan dan Masyarakat yang Mendapat Komunikasi, Informasi, dan Edukasi Terkait Pendaftaran Penduduk	-	Laporan			Dapat dilakukan Oleh satu OPD	Sedang Berjalan	APBD Kabupaten
2	12	02	2.04	03	Bimbingan teknis terkait Pendaftaran Penduduk			Kota taagung Timur	Jumlah Laporan bimbingan Teknis Terkait Pendaftaran Penduduk	-	Laporan			Jumlah Laporan bimbingan Teknis Terkait Pendaftaran Penduduk	-	Laporan			Jumlah Laporan bimbingan Teknis Terkait Pendaftaran Penduduk	-	Laporan			Dapat dilakukan Oleh satu OPD	Sedang Berjalan	APBD Kabupaten
																								Dapat dilakukan Oleh satu OPD	Sedang Berjalan	
2	12	03			PROGRAM PENCATATAN SIPIL			Kota taagung Timur	Persentase Penerbitan Akta Kelahiran	100	%			Persentase Penerbitan Akta Kelahiran	100	%			Persentase Penerbitan Akta Kelahiran	100	%	1.011.500,00	1.011.500,00	Dapat dilakukan Oleh satu OPD	Sedang Berjalan	APBD Kabupaten
2	12	03	2.01		Pelayanan Pencatatan Sipil			Kota taagung Timur	Persentase Penerbitan Akta Kelahiran Usia 0 - 18 Tahun	100	%			Persentase Penerbitan Akta Kelahiran Usia 0 - 18 Tahun	100	%			Persentase Penerbitan Akta Kelahiran Usia 0 - 18 Tahun	100	%	1.011.500,00	1.011.500,00	Dapat dilakukan Oleh satu OPD	Sedang Berjalan	APBD Kabupaten
2	12	03	2.01	01	Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Laporan Peristiwa Penting	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan dan Stabilitas Kamtibmas	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik yang Diotopang oleh Efisiensi Struktur Pemerintahan, Kapasitas Pegawai Pemerintah dan Lembaga Legislatif	Kota taagung Timur	Jumlah Dokumen Hasil Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Laporan Peristiwa Penting	4.200	Akta		4.200	Akta	Jumlah Dokumen Hasil Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Laporan Peristiwa Penting	4.200	Akta		1.011.500,00	1.011.500,00			Dapat dilakukan Oleh satu OPD	Sedang Berjalan	APBD Kabupaten	
2	12	03	2.01	05	Pengadaan Dokumen Kependudukan selain Blangko KTP-el, Formulir, dan Buku terkait Pencatatan Sipil sesuai dengan kebutuhan			Kota taagung Timur	Jumlah Dokumen Kependudukan selain Blangko KTP-El, Formulir, dan Buku Terkait Pencatatan Sipil Sesuai dengan Kebutuhan yang Tersedia		Paket			Jumlah Dokumen Kependudukan selain Blangko KTP-El, Formulir, dan Buku Terkait Pencatatan Sipil Sesuai dengan Kebutuhan yang Tersedia		Paket			Jumlah Dokumen Kependudukan selain Blangko KTP-El, Formulir, dan Buku Terkait Pencatatan Sipil Sesuai dengan Kebutuhan yang Tersedia		Paket			Dapat dilakukan Oleh satu OPD	Sedang Berjalan	APBD Kabupaten
2	12	03	2.02		Penyelenggaraan Pencatatan Sipil				Persentase Penyelenggaraan Pencatatan Sipil	100	%			Persentase Penyelenggaraan Pencatatan Sipil	100	%			Persentase Penyelenggaraan Pencatatan Sipil	100	%			Dapat dilakukan Oleh satu OPD	Sedang Berjalan	APBD Kabupaten
2	12	03	2.02	01	Koordinasi dengan kantor kementerian yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang Agama Kabupaten/ kota dan Pengadilan Agama yang berkaitan dengan Pencatatan Nikah, Talak, Cerai dan Rujuk bagi Penduduk yang Beragama Islam			Kota taagung Timur	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dengan Kantor Kementerian yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang Agama Kabupaten/ Kota dan Pengadilan Agama yang Berkaitan dengan Pencatatan Nikah, Talak, Cerai, dan Rujuk bagi Penduduk yang Beragama Islam		Laporan			Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dengan Kantor Kementerian yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang Agama Kabupaten/ Kota dan Pengadilan Agama yang Berkaitan dengan Pencatatan Nikah, Talak, Cerai, dan Rujuk bagi Penduduk yang Beragama Islam		Laporan			Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dengan Kantor Kementerian yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang Agama Kabupaten/ Kota dan Pengadilan Agama yang Berkaitan dengan Pencatatan Nikah, Talak, Cerai, dan Rujuk bagi Penduduk yang Beragama Islam		Laporan			Dapat dilakukan Oleh satu OPD	Sedang Berjalan	APBD Kabupaten

2	12	03	2.02	08	Sosialisasi terkait Pencatatan Sipil			Kotaagung Timur	Jumlah Laporan Hasil sosialisasi Pencatatan Sipil	-	Laporan	Jumlah Laporan Hasil sosialisasi Pencatatan Sipil	-	Laporan	Jumlah Laporan Hasil sosialisasi Pencatatan Sipil	-	Laporan	-	-	Dapat dilakukan Oleh satu OPD	Sedang Berjalan	APBD Kabupaten
2	12	03	2.03		Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pencatatan Sipil				Persentase Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pencatatan Sipil	-	%	Persentase Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pencatatan Sipil	-	%	Persentase Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pencatatan Sipil	-	%	-	-	Dapat dilakukan Oleh satu OPD	Sedang Berjalan	APBD Kabupaten
2	12	03	2.03	02	Pembinaan dan Pengawasan terkait Pencatatan Sipil			Kotaagung Timur	Jumlah Laporan dan Pengawasan yang Telah Dilakukan	-	Laporan	Jumlah Laporan dan Pengawasan yang Telah Dilakukan	-	Laporan	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan yang Telah Dilakukan	-	Laporan	-	-	Dapat dilakukan Oleh satu OPD	Sedang Berjalan	APBD Kabupaten
2	12	03	2.03	04	Bimbingan teknis terkait Pencatatan Sipil			Kotaagung Timur	Jumlah Laporan Hasil Bimbingan Teknis Terkait Pencatatan Sipil	-	Laporan	Jumlah Laporan Hasil Bimbingan Teknis Terkait Pencatatan Sipil	-	Laporan	Jumlah Laporan Hasil Bimbingan Teknis Terkait Pencatatan Sipil	-	Laporan	-	-	Dapat dilakukan Oleh satu OPD	Sedang Berjalan	APBD Kabupaten
2	12	04			PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASIA DMINISTRASI KEPENDUDUKAN			Kotaagung Timur	Persentase OPD yang Melakukan PKS	100	%	Persentase OPD yang Melakukan PKS	100	%	Persentase OPD yang Melakukan PKS	100	%	1.604.300,00	2.752.400,00	Dapat dilakukan Oleh satu OPD	Sedang Berjalan	APBD Kabupaten
2	12	04	2.01		Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan			Kotaagung Timur	Persentase OPD yang mengajukan PKS	100	%	Persentase OPD yang mengajukan PKS	100	%	Persentase OPD yang mengajukan PKS	100	%	1.604.300,00	2.752.400,00	Dapat dilakukan Oleh satu OPD	Sedang Berjalan	APBD Kabupaten
2	12	04	2.01	01	Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan			Kotaagung Timur	Jumlah Dokumen Data Kependudukan yang Diolah dan Disajikan	-	Dokumen	Jumlah Dokumen Data Kependudukan yang Diolah dan Disajikan	-	Dokumen	Jumlah Dokumen Data Kependudukan yang Diolah dan Disajikan	-	Dokumen	-	-	Dapat dilakukan Oleh satu OPD	Sedang Berjalan	APBD Kabupaten
2	12	04	2.01	02	Kerjasama Pemanfaatan Data Kependudukan	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan dan Stabilitas Kamtibmas	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik yang Ditopang oleh Efisiensi Struktur Pemerintahan, Kapasitas Pegawai Pemerintah dan Lembaga Legislatif	Kotaagung Timur	Jumlah Dokumen Kerja Sama Pemanfaatan Data Kependudukan	32	Dokumen	Jumlah Dokumen Kerja Sama Pemanfaatan Data Kependudukan	32	Dokumen	Jumlah Dokumen Kerja Sama Pemanfaatan Data Kependudukan	32	Dokumen	1.604.300,00	2.752.400,00	Dapat dilakukan Oleh satu OPD	Sedang Berjalan	APBD Kabupaten
2	12	04	2.03		Penyelenggaraan Pengelolaan Administrasi Kependudukan			Kotaagung Timur	Persentase Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	-	%	Persentase Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	-	%	Persentase Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	-	%	-	-	Dapat dilakukan Oleh satu OPD	Sedang Berjalan	APBD Kabupaten

2	12	04	2.03	01	Koordinasi Antar Lembaga Pemerintah dan Lembaga Non-Pemerintah di Kabupaten/Kota dalam Penerbitan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan				Ko ta a g u n g Timur	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Antar Lembaga Pemerintah dan Lembaga Non-Pemerintah di Kabupaten/Kota dalam Penerbitan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	-	Laporan		-	Laporan		-	Dapat dilakukan Oleh satu OPD	Sedang Berjalan	APBD Kabupaten	
2	12	04	2.03	04	Penyelenggaraan Pemanfaatan Data Kependudukan				Ko ta a g u n g Timur	Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Pemanfaatan Data Kependudukan	-	Dokumen		-	Dokumen		-	Dapat dilakukan Oleh satu OPD	Sedang Berjalan	APBD Kabupaten	
2	12	04	2.03	05	Sosialisasi terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan				Ko ta a g u n g Timur	Jumlah Laporan Hasil Sosialisasi Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	-	Laporan		-	Laporan		-	Dapat dilakukan Oleh satu OPD	Sedang Berjalan	APBD Kabupaten	
2	12	04	2.03	06	Kerjasama dengan Organisasi kemasyarakatan dan Perguruan Tinggi				Ko ta a g u n g Timur	jumlah Dokumen Kerjasama dengan Organisasi kemasyarakatan dan Perguruan Tinggi	-	Dokumen		-	Dokumen		-	Dapat dilakukan Oleh satu OPD	Sedang Berjalan	APBD Kabupaten	
2	12	04	2.03	08	Penyajian Data Kependudukan Yang Akurat dan dapat Dipertanggungjawabkan		20		Ko ta a g u n g Timur	Jumlah Data Kependudukan yang Akurat dan Dapat Dipertanggungjawabkan	20	Dokumen		20	Dokumen		20	Dapat dilakukan Oleh satu OPD	Sedang Berjalan	APBD Kabupaten	
2	12	04	2.04		Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan		100	%	Ko ta a g u n g Timur	Persentase Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	100	%		100	%		100	%	Dapat dilakukan Oleh satu OPD	Sedang Berjalan	APBD Kabupaten
2	12	04	2.04	03	Bimbingan Teknis terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pendayagunaan Data Kependudukan				Ko ta a g u n g Timur	Jumlah Laporan Hasil Bimbingan Teknis Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pendayagunaan Data Kependudukan	-	Laporan		-	Laporan		-	Dapat dilakukan Oleh satu OPD	Sedang Berjalan	APBD Kabupaten	
2	12	05			PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN		100	%	Ko ta a g u n g Timur	Persentase profil Kependudukan Berdasarkan Jenis Kelamin	100	%		100	%		100	%	Dapat dilakukan Oleh satu OPD	Sedang Berjalan	APBD Kabupaten
2	12	05	2.01		Penyusunan Profil Kependudukan		100	%	Ko ta a g u n g Timur	Persentase Penerbitan Buku Profil Kependudukan	100	%		100	%		100	%	Dapat dilakukan Oleh satu OPD	Sedang Berjalan	APBD Kabupaten

2	12	05	2.01	01	Penyediaan data kependudukan kabupaten/kota	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan dan Stabilitas Kamtibmas	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik yang Ditopang oleh Efisiensi Struktur Pemerintahan, Kapasitas Pegawai Pemerintah dan Lembaga Legislatif	Kotaagung Timur	Jumlah Data Kependudukan Kabupaten/Kota	2,00	Semester	Jumlah Data Kependudukan Kabupaten/Kota	2,00	Semester	Jumlah Data Kependudukan Kabupaten/Kota	2,00	Semester	1.320.000,00	7.620.000,00	Dapat dilakukan Oleh satu OPD	Sedang Berjalan	APBD Kabupaten
2	12	05	2.01	02	Penyusunan Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta kebutuhan yang lain			Kotaagung Timur	Jumlah Dokumen Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta Kebutuhan yang Lain	0	Dokumen	Jumlah Dokumen Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta Kebutuhan yang Lain	0	Dokumen	Jumlah Dokumen Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta Kebutuhan yang Lain	0	Dokumen	0,00	0,00	Dapat dilakukan Oleh satu OPD	Sedang Berjalan	APBD Kabupaten
Jumlah																	8.701.322.723,00	9.379.743.263,00				

BAB IV

PENUTUP

Sejalan dengan kebijakan Otonomi Daerah, pembangunan Kabupaten Tanggamus dipengaruhi oleh situasi dan kondisi yang berkembang sebagai dampak penerapan Otonomi Daerah di Kabupaten Tanggamus. Oleh karena itu, tidak menutup kemungkinan terjadi deviasi / distorsi perubahan sasaran yang akan dicapai. Untuk itu diperlukan adanya upaya monitoring dan evaluasi yang berkelanjutan terhadap program – program yang akan dilaksanakan atau telah dilaksanakan atau dilaksanakan secara sistematis dan terencana.

Perubahan Renja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanggamus Tahun 2024 tidak terlepas dari kearifan dan konsistensi pihak eksekutif dan legislative selaku daerah dalam menyikapi situasi dan kondisi yang dinamis. Penekanan Renja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanggamus ini tidak lain adalah sebuah garis kebijaksanaan yang disusun untuk menjawab bagaimana Kabupaten Tanggamus dibangun, khususnya di bidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

Menyikapi tentang perubahan undang – undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menjadi undang – undang Nomor 24 Tahun 2013 dimana Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil mempunyai tugas dan tanggung jawab:

- Melaksanakan sosialisasi tingkat Kabupaten, Kecamatan, Pekon, RT, RW dan kepada semua lapisan masyarakat;

- Meningkatkan efektifitas pelayanan administrasi kependudukan kepada masyarakat dengan mengutamakan pelayanan Online, dalam rangka menyambut Digitalisasi Pelayanan.

Perubahan Renja 2024 ini sebagai acuan dalam pelaksanaan pembangunan, mutlak diperlukan sebagai jaminan dalam pelaksanaan dan pertanggungjawaban terhadap pelaksanaan proses layanan Administrasi Kependudukan.

Kotaagung, 21 Agustus 2024

**KEPALA DINAS
KEPENDUDUKAN DAN
PENCATATAN SIPIL**



MARADONA, S.STP., M.Si
NIP. 19790903 199810 1 001